



PEMERINTAHAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2025-2029





Jalan Cut Nyak Dien, Nomor 33, Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur 75512

Laman : www.dinkes.kutakartanegarakab.go.id Pos-el : dinaskesehatan.kukar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B-270/DINKES/SKRT/000.7.2.2/1/2026

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arahan kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029*; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

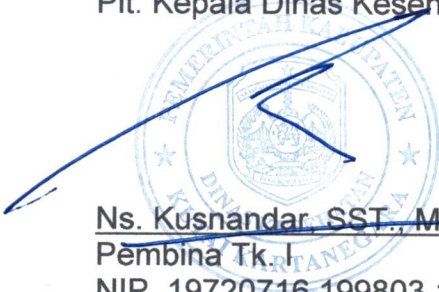
KEDUA

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 06 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan


Ns. Kusnandar SST., M.Adm.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19720716 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

Jln. Cut Nyak Dien No. 33 Telp. (0541) 661082 Fax. (0541) 662258 Kode Pos 75512

Website : www.dinkes.kutaikartanegarakab.go.id E-mail: dinaskesehatan.kukar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B-10298/DINKES/SKRT /000.7.2.2/12/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyiapkan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan jangka menengah perlu disusun rencana strategis dinas Kesehatan mengacu pada RPJMD;
- b. bahwa untuk menyiapkan pedoman rencana strategis tersebut perlu dibentuk tim penyusun rencana strategis Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
Kesatu : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 2025 - 2029
- Kedua** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2025 – 2029 dengan susunan personil terlampir
- Ketiga** : Tim bertugas :
- 1. Menyiapkan dan mengumpulkan data capaian kinerja program dan kegiatan pada masing-masing bidang.
 - 2. Menyusun dan mengisi matrik kertas kerja program bahan penyusunan Renstra masing-masing bidang.
 - 3. Menyusun naskah dan analisis Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi dengan mengacu pada RPJMD.
- Keempat** : Tim yang dibentuk melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- Kelima** : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara
Tanggal : 30 Desember 2024

PLT. KEPALA,

KUSMANDAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : B-10298/DINKES/SKRT /000.7.2.2/12/2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan
Ketua	: Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris	: Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penyusunan Program
Anggota	: 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 5. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 7. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 8. Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Kerjasama 9. Ketua Tim Kerja Regulasi, Peningkatan Mutu dan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 11. Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 12. Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, Penanggulangan Luar Biasa 13. Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan 14. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

15. Ketua Tim Kerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
16. Ketua Tim Kerja Perbekalan Alat Kesehatan
17. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian
18. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Keluarga
19. Ketua Tim Kerja Integrasi Layanan Primer dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
20. Ketua Tim Kerja Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat
21. Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan Publikasi dan Media
22. Direktur RSUD AM. Parikesit Tenggarong
23. Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja
24. Direktur RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
25. Kepala UPTD Gudang Farmasi
26. Tim Kerja Perencanaan dan Penyusunan Program

Ditetapkan di : Tenggarong

Tanggal : 30 Desember 2024

PLT KEPALA,



KUSNANDAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia serta izin nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategi (RENSTRA) ini berisikan upaya pembangunan Kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, kerangka pendanaan, sampai dengan kerangka regulasi dan menjadi dasar penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategi (RENSTRA).

Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) dengan mengacu pada Visi Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025– 2029.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak terlepas dari kesinambungan antar upaya program kesehatan dan kerjasama lintas sektor, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pembangunan kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip perikemanusiaan, keadilan, non diskriminasi, serta norma agama dan sosial budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

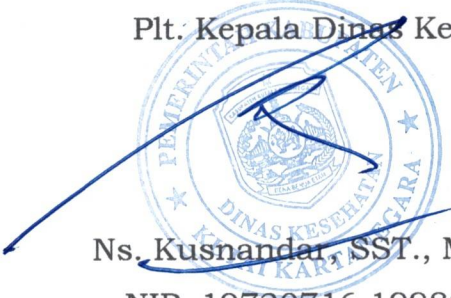
Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan bidang Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* jajaran Kesehatan baik di Kabupaten maupun Kecamatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya dan dengan semangat, kerja keras, profesionalisme dan bimbingan Allah SWT akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dibuat di : Kutai Kartanegara

Pada Tanggal : 06 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Ns. Kusnandar, SST., M.Adm.Kes

NIP. 19720716 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

 STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 12

 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah..... 13

 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 25

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 40

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 67

 2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 67

 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 69

 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 69

 2.2.2. Isu Strategis 73

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 79

 3.1 Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 79

 3.2 Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 81

 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 90

 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 90

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 93

 4.1 Uraian Program 93

 4.2 Uraian Kegiatan 93

4.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target
dan Pagu Indikatif.....95

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah..... 180

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 186

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja
Kunci (IKK) 186

BAB V PENUTUP 189

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025..... 25

2.2 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kualifikasi Golongan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025..... 26

2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024..... 28

2.4 Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Per 1.000 Penduduk 32

2.5 Sarana Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 34

2.6 Sumber Pembiayaan Kesehatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024 37

2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2026 42

2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.... 56

2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 69

2.10 Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ..75

3.1 Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 –2029... 80

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029..... 83

3.3 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 87

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 88

3.5 Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 91

4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.... 103

4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025-2029..... 135

4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas 180

4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Strategis Kepala Daerah 184

4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025-2029..... 186

4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025-2029..... 187

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Kutai
Kartanegara Tahun 202524

2.2 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2020 - 202450

2.3 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 – 202450

2.4 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2020 - 202451

2.5 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2020 – 202452

2.6 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 202453

2.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Kesehatan
KabupatenKutai Kartanegara Tahun 2021 – 2024.....55

3.1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara 86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat di masyarakat. Dengan Kesehatan yang optimal, diharapkan tercipta Sumber Daya Manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga dapat berkontribusi pada Pembangunan Daerah maupun Nasional secara berkelanjutan.

Keberhasilan Pembangunan Kesehatan tidak terlepas dari kesinambungan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pembangunan kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip perikemanusiaan, keadilan, non diskriminasi, serta norma agama dan sosial budaya, sebagaimana diatur dalam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perencanaan pembangunan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan, demi mencapai kondisi yang lebih baik. Sebagai elemen penting pembangunan, perencanaan memberikan arah yang jelas dalam perkembangan daerah, sekaligus berfungsi sebagai standar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Tanpa perencanaan yang matang, tujuan pembangunan akan sulit dicapai.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan perangkat daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2025–2029.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun Rencana Strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan mengacu pada visi pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu

KUKAR IDAMAN TERBAIK

***"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata dan Industri Hijau
Yang Maju Sejahtera dan Berkelanjutan".***

Visi ini menjadi landasan strategis dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi sebagai fondasi menuju terwujudnya Generasi Emas Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi Pembangunan Daerah serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra ini disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, serta diharapkan menjadi instrumen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan, pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kutai Kartanegara. Rencana Strategis dan juga menjadi acuan Rumah Sakit UOBK/UPT yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta benar-benar mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan berlandaskan hukum-hukum sebagai

berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN);
13. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 No. 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
31. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
32. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
33. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
34. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 37/SK-BUP/HK/2017 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Bertahap Dan Penuh Terhadap UPTD Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dimaksud sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029, sesuai tugas pokok dan

fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk:

1. Mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya bidang kesehatan.
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya.
4. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra /kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, permasalahan pelayanan serta isu strategis bidang Kesehatan.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.1.4 Kelompok Sasaran layanan

Bagian ini berisi institusi dan jejaring yang menjadi sasaran layanan perangkat daerah

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat pihak-pihak (baik dari dalam maupun luar pemerintahan) yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan perangkat daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, telaahan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah dan Indikator Utama Pembangunan yang tertuang pada RPJMD Tahun 2025- 2029, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.2.2 Isu Strategis

Bagian ini berisi isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Kab./Kota Tahun 2025-2029

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

3.2. Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) PD Kab./Kota Tahun 2025-2029

Pada bagian ini diuraikan tentang sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

3.3. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2025-2029

Berisi strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025-2029.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2025-2029

Berisi arah kebijakan Dinas Kesehatan Untuk mendukung strategi yang sudah diuraikan sebelumnya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Berisikan uraian program-program yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan

4.2. Uraian Kegiatan

Berisikan uraian kegiatan-kegiatan yang mendukung program yang telah dirumuskan.

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif

Berisikan sub kegiatan yang mendukung kegiatan yang telah dirumuskan, beserta indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif.

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Berisikan sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada bagian ini berisikan target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada bagian ini berisikan target dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025-2029, serta menjelaskan implementasi Renstra sebagai acuan strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesehatan dan menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu pada bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 7, disebutkan Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dengan Tipe A.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) terdiri dari UPTD Puskesmas, UPTD Gudang Farmasi Kabupaten, UPTD Labkesda dan Elektromedik, serta Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK). Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Puskesmas serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kesehatan memiliki tugas utama mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Kesehatan.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan;
2. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di Bidang Kesehatan;
3. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di Bidang Kesehatan;
4. Penyusunan laporan di bidang kesehatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan unit kerja yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus).

B. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Perumusan Alternatif Kebijakan Daerah Berbasis Data Dan Informasi Di Bidang Kesehatan;
- b. Merumuskan Dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dan Administrasi Di Bidang Kesehatan;
- c. Merumuskan Dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Kerja Di Bidang Kesehatan;
- d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi Di Bidang Kesehatan;
- e. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Di Bidang Kesehatan;

- f. Memberikan Penilaian Kinerja Secara Berjenjang; dan
- g. Melaksanakan Dan Melaporkan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Bupati Baik Secara Tertulis Maupun Lisan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan penganggaran, keuangan dan aset. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, kompilasi Standar Operasional Prosedur/SOP, Standar Pelayanan/SP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan perangkat daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan dan menghimpun penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD, LKPI dan LKPP), Laporan Penyelenggaraan SPIP, dan laporan kinerja lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 2) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah;
- 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 5) Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 6) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - 7) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - 8) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Dan
 - 9) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri atas menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, melaksanakan dan melaporkan progres penataan dan penertiban aset Perangkat Daerah, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian, penyusunan program, serta keuangan dan aset;
- h. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
- j. Sekretaris, membawahi 2 (dua) sub Bagian yaitu;
- 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan keuangan dan aset.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, perizinan fasilitas kesehatan, Badan Layanan Umum Daerah, kerjasama pelayanan kesehatan serta data informasi kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, perizinan fasilitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah, kerjasama pelayanan serta data informasi kesehatan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, perizinan fasilitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah, kerjasama pelayanan serta data informasi kesehatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan E-Government, Standar Operasional Prosedur, dan Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan Perangkat Daerah, pengembangan inovasi perangkat daerah, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta laporan penyelenggaraan SPIP urusan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, perizinan fasilitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah, kerjasama pelayanan serta data informasi kesehatan;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah kabupaten/kota;
 - 2) penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah kabupaten/kota;

- 3) penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 4) penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan mutu pelayanan, perizinan fasilitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah, kerjasama pelayanan serta data informasi kesehatan;
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
4. Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
- Kepala Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans, imunisasi, penanggulangan keadaan luar biasa dan penyehatan lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans, imunisasi, penanggulangan keadaan luar biasa dan penyehatan lingkungan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans, imunisasi, penanggulangan keadaan luarbiasa dan penyehatan lingkungan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP,

- dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta laporan penyelenggaraan sipip urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta surveilans, imunisasi dan penanggulangan keadaan luar biasa dan penyehatan lingkungan;
 - e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
 - 1) penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten;
 - 2) penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum; dan
 - 3) penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, surveilans, imunisasi, penanggulangan keadaan luar biasa dan penyehatan lingkungan.
 - h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
 - i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pengelolaan dan perizinan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan, serta kefarmasian dan perbekalan kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan pengelolaan dan perizinan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan, serta kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan pengelolaan dan perizinan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan, serta kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- d. mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta laporan penyelenggaraan SPIP urusan pengelolaan dan perizinan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan, serta kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- e. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan :
 - 1) perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota;
 - 2) pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah

- kabupaten/kota;
- 3) pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota; penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah kabupaten /kota;
 - 4) pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - 5) pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - 6) penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; dan
 - 7) pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pengelolaan dan perizinan sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana kesehatan, serta kefarmasian dan perbekalan kesehatan.
- h. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
- i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyajikan data menjadi informasi serta mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan promosi, pemberdayaan masyarakat, kesehatan Keluarga, serta peningkatan gizi masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
- melaksanakan penyajian data menjadi informasi urusan Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Keluarga, serta Peningkatan

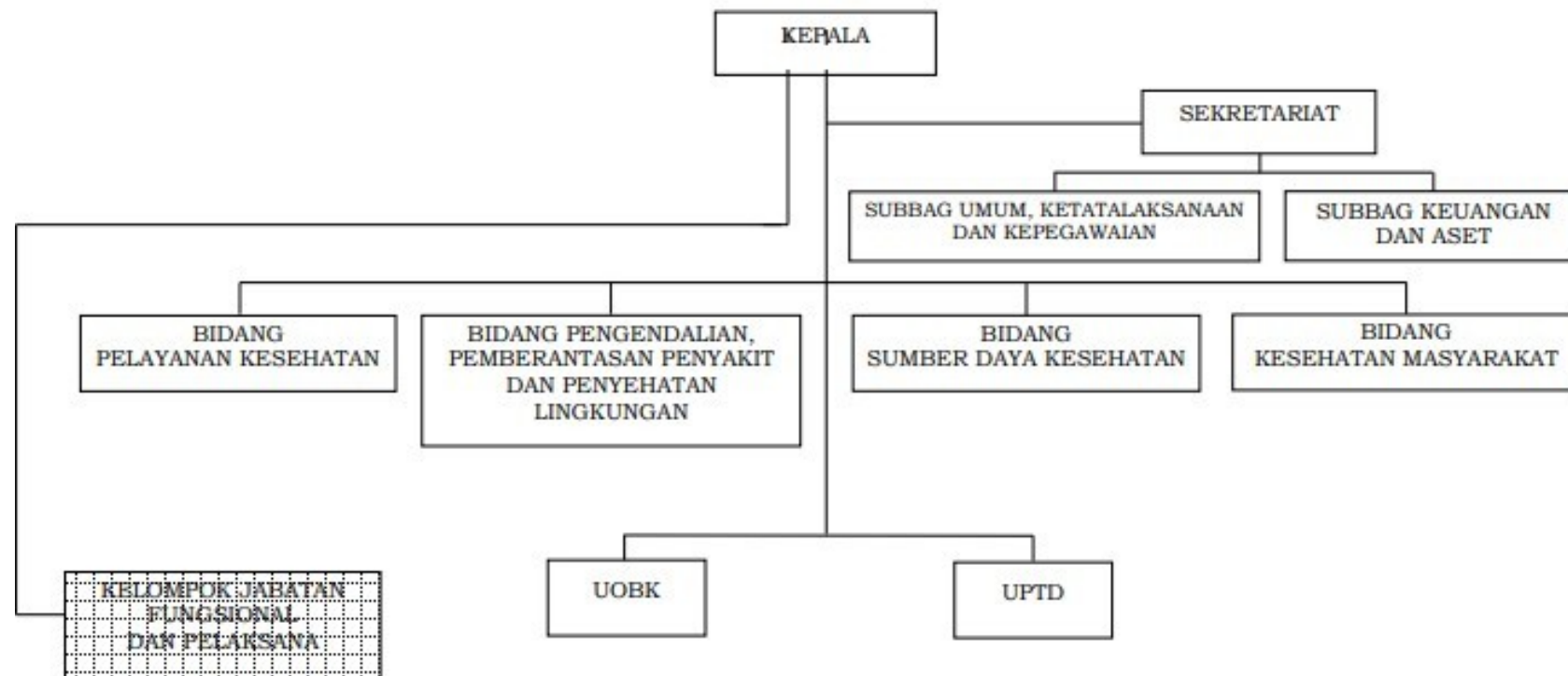
Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi urusan Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Keluarga, serta Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi/RB (pelaksanaan *E-Government*, Standar Operasional Prosedur/SOP, dan Perjanjian Kinerja/PK, keterbukaan informasi publik, tim manajemen perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, pengembangan inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*/WBS, survei indeks kepuasan masyarakat, survei internal organisasi, survei indeks persepsi korupsi, serta pelaksanaan fungsi PPID Pembantu);
- c. mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta Laporan Penyelenggaraan SPIP urusan Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Keluarga, serta Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- d. mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan : penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah kabupaten/kota; pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah kabupaten/kota; pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat Daerah kabupaten/kota; penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, mewujudkan tingkat kepatuhan atas LHKPN dan LHKASN, serta melaksanakan tata kelola arsip;
- f. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan Promosi,

- Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan Keluarga, serta Peningkatan Gizi Masyarakat, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- g. memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- Dinas Kesehatan membawahi 34 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu:
- 1) UPTD Puskesmas Samboja
 - 2) UPTD Puskesmas Handil Baru
 - 3) UPTD Puskesmas Muara Jawa
 - 4) UPTD Puskesmas Sungai Merdeka
 - 5) UPTD Puskesmas Batuah
 - 6) UPTD Puskesmas Loa Janan
 - 7) UPTD Puskesmas Loa Duri
 - 8) UPTD Puskesmas Loa Kulu
 - 9) UPTD Puskesmas Jonggon Jaya
 - 10) UPTD Puskesmas Sanga Sanga
 - 11) UPTD Puskesmas Sungai Meriam
 - 12) UPTD Puskesmas Muara Badak
 - 13) UPTD Puskesmas Badak Baru
 - 14) UPTD Puskesmas Perangkat
 - 15) UPTD Puskesmas Marangkayu
 - 16) UPTD Puskesmas Teluk Dalam
 - 17) UPTD Puskesmas Sebulu 1
 - 18) UPTD Puskesmas Sebulu 2
 - 19) UPTD Puskesmas Separi 3
 - 20) UPTD Puskesmas Rapak Mahang
 - 21) UPTD Puskesmas Mangkurawang
 - 22) UPTD Puskesmas Loa Ipuh
 - 23) UPTD Puskesmas Muara Kaman
 - 24) UPTD Puskesmas Bunga Jadi
 - 25) UPTD Puskesmas Kota Bangun
 - 26) UPTD Puskesmas Rimba Ayu
 - 27) UPTD Puskesmas Muara Muntai
 - 28) UPTD Puskesmas Muara Wis
 - 29) UPTD Puskesmas Kembang Janggut

- 30) UPTD Puskesmas Kahala
 - 31) UPTD Puskesmas Ritan
 - 32) UPTD Puskesmas Tabang
 - 33) UPTD Gudang Farmasi Kabupaten
 - 34) UPTD LABKESDA & ELEKTROMEDIK
8. Unit organisasi Bersifat Khusus (UOBK).
- Dinas Kesehatan membawahi 4 Unit organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yaitu:
- 1) RSUD AM. Parikesit Tenggarong
 - 2) RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti (ABADI) Samboja
 - 3) RSUD Dayaku Raja Kota Bangun
 - 4) RSUD Adji Muhammad Idris Muara Badak
9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025



2.1.2.Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan dukungan Sumber Daya Kesehatan yang mencakup tenaga kesehatan, pembiayaan, dan sarana prasarana kesehatan. Berikut ini adalah gambaran situasi sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. SDM ini mencakup berbagai jenis tenaga kerja dengan kualifikasi yang beragam, yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Adapun SDM meliputi SDM di Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit.

A. Menurut Kualifikasi Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kualifikasi pendidikan sebagai gambaran tentang kapasitas tenaga kerja di bidang kesehatan, yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No.	JENJANG PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
1	S3	0	1	1
2	S2	73	61	134
3	S1	352	642	994
4	D4	32	142	174
5	D3	412	1376	1788
6	D2	1	1	2
7	D1	1	6	7
8	SLTA	299	227	526
9	SLTP	8	6	14
10	SD	8	1	9
	JUMLAH	1186	2463	3649

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diatas, terdapat 3.649 pegawai yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas dengan tingkat pendidikan D3 sampai S3 sebanyak 3.091 pegawai atau 84,7%.

Tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas dan kinerja pelayanan kesehatan. Khususnya bagi tenaga kesehatan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas pelayanan, kepuasan pasien, dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Pendidikan juga mempengaruhi kemampuan tenaga kesehatan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dan inovatif dalam memberikan perawatan kepada pasien

B. Menurut Pangkat/Golongan

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pangkat dan golongan, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi SDM sesuai jenjang karier, yang menjadi salah satu indikator dalam mendukung kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.2.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Kualifikasi Golongan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No.	GOLONGAN	JUMLAH	Ket
1	IV	136	-
2	III	770	-
3	III	268	-
4	I	6	-
5	XI	2	PPPK
6	X	222	PPPK
7	IX	239	PPPK
8	VII	1067	PPPK
9	V	86	PPPK
10	I	5	PPPK
	JUMLAH	2801	

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sumber daya manusia (SDM) berdasarkan pangkat dan golongan menunjukkan sebaran pegawai dinas kesehatan pada berbagai tingkat tanggung jawab dan kewenangan, yang dapat digunakan untuk

perencanaan kebutuhan tenaga kerja, evaluasi kualifikasi, dan manajemen pengembangan karier.

C. Menurut Jenis Tenaga Kesehatan

Sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan jenis tenaga kesehatan, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang distribusi SDM sesuai jenjang karier, yang menjadi salah satu indikator dalam mendukung kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.3.

**Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025 Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024**

Nama Fasyankes	Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		Tenaga Sanitasi Lingkungan		Nutrisionis		Ahli Teknologi Laboratori um Medik		Tenaga Administr asi Keuangan		Tenaga Sistem Informasi Kesehatan		Ket.
	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	
Puskesmas Perkotaan (Non Rawat Inap)																							
SAMBOJA	1	4	1	1	5	15	4	21	1	2	2	1	1	1	1	2	1	3	1	3	1	0	Tidak Memenuhi Standar
LOA JANAN	1	3	1	2	5	15	4	16	1	4	2	2	1	1	1	3	1	3	1	3	1	0	Memenuhi Standar
MANGKURAWANG	1	4	1	1	5	17	4	15	1	2	2	2	1	2	1	1	1	3	1	2	1	0	Memenuhi Standar
RAPAK MAHANG	1	7	1	1	5	14	4	19	1	5	2	1	1	2	1	1	1	3	1	5	1	0	Tidak Memenuhi Standar
LOA IPUH	1	4	1	1	5	23	4	10	1	3	2	3	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	Memenuhi Standar
Puskesmas Pedesaan (Non Rawat Inap)																							
BUNGA JADI	1	2	1	1	5	16	4	16	1	2	1	0	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	Tidak Memenuhi Standar
SUNGAI MERDEKA	1	2	1	1	5	12	4	18	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	Memenuhi Standar
HANDIL BARU	1	2	1	3	5	16	4	19	1	4	1	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	Memenuhi Standar
BATUAH	1	1	1	2	5	9	4	9	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	Memenuhi Standar
LOA DURI	1	2	1	1	5	11	4	12	1	2	1	2	1	1	1	1	1	3	1	8	1	0	Memenuhi Standar

Nama Fasyankes	Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		Tenaga Sanitasi Lingkungan		Nutrisionis		Ahli Teknologi Laboratori um Medik		Tenaga Administrasi Keuangan		Tenaga Sistem Informasi Kesehatan		Ket.
	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	
LOA KULU	1	5	1	1	5	31	4	32	1	2	1	4	1	2	1	1	1	2	1	2	1	0	Memenuhi Standar
JONGGON JAYA	1	1	1	1	5	9	4	10	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	Memenuhi Standar
MUARA WIS	1	1	1	0	5	13	4	16	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	3	1	0	Tidak Memenuhi Standar
SEPARI III	1	2	1	1	5	14	4	18	1	2	1	2	1	0	1	2	1	1	1	2	1	1	Memenuhi Standar
TELUK DALAM	1	3	1	1	5	28	4	38	1	3	1	1	1	2	1	2	1	3	1	3	1	1	Memenuhi Standar
Puskesmas Pedesaan (Rawat Inap)																							
MUARA JAWA	2	4	1	1	8	19	7	18	1	2	1	1	1	0	2	1	1	3	1	1	1	0	Tidak Memenuhi Standar
SANGA-SANGA	2	2	1	1	8	13	7	17	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	Tidak Memenuhi Standar
MUARA MUNTAI	2	2	1	0	8	34	7	30	1	3	1	2	1	1	2	2	1	3	1	3	1	1	Memenuhi Standar
KOTA BANGUN	2	2	1	1	8	24	7	25	1	3	1	2	1	2	2	2	1	2	1	0	1	0	Memenuhi Standar
RIMBA AYU	2	1	1	0	8	21	7	21	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	0	1	1	Tidak Memenuhi Standar
SEBULU I	2	2	1	2	8	20	7	24	1	4	1	2	1	1	2	2	1	3	1	2	1	1	Memenuhi Standar
SEBULU II	2	2	1	1	8	16	7	18	1	4	1	2	1	1	2	2	1	3	1	5	1	1	Memenuhi Standar
Puskesmas Pedesaan (Rawat Inap)																							
SUNGAI MARIAM	2	1	1	1	8	28	7	28	1	3	1	2	1	1	2	1	1	4	1	3	1	0	Tidak Memenuhi Standar
MUARA BADAK	2	2	1	1	8	22	7	26	1	4	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	2	Memenuhi Standar
BADAK BARU	2	3	1	1	8	20	7	20	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	Memenuhi Standar
MARANG KAYU	2	1	1	3	8	22	7	24	1	4	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	Tidak Memenuhi Standar

Nama Fasyankes	Dokter dan/atau Dokter Layanan Primer		Dokter Gigi		Perawat		Bidan		Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian		Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku		Tenaga Sanitasi Lingkungan		Nutrisionis		Ahli Teknologi Laboratori um Medik		Tenaga Administ rasi Keuangan		Tenaga Sistem Informasi Kesehatan		Ket.
	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	Standar	Tersedia	
Puskesmas Pedesaan (Rawat Inap)																							
PERANGAT	2	2	1	1	8	13	7	17	1	5	1	2	1	0	2	1	1	3	1	2	1	0	Tidak Memenuhi Standar
MUARA KAMAN	2	1	1	2	8	11	7	11	1	2	1	2	1	0	2	0	1	1	1	1	1	3	Tidak Memenuhi Standar
Puskesmas Terpencil (Rawat Inap)																							
KAHALA	2	1	1	1	8	11	7	12	1	1	1	1	1	0	2	2	1	1	1	6	1	0	Tidak Memenuhi Standar
KEMBANG JANGGUT	2	2	1	1	8	18	7	26	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	Tidak Memenuhi Standar
TABANG	2	1	1	0	8	9	7	14	1	1	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	Tidak Memenuhi Standar
RITAN BARU	2	1	1	1	8	11	7	12	1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	1	1	1	0	Tidak Memenuhi Standar

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya yang tersebar di 32 Puskesmas masih belum memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana yang termuat pada Permenkes no 6 Tahun 2024. Kekurangan tenaga kesehatan ini tidak hanya pada puskesmas dengan kategori terpencil, tetapi merata pada puskesmas perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini terjadi karena distribusi tenaga yang belum merata. Hal yang sama juga terjadi pada pemenuhan 9 tenaga kesehatan yang wajib ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dimana di beberapa puskesmas masih ada tenaga yang belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemetaan SDM kesehatan di 27 Puskesmas (Perkotaan, Pedesaan, Rawat Inap dan Terpencil), ditemukan bahwa lebih dari 40% Puskesmas belum memenuhi standar minimal tenaga kesehatan sesuai Permenkes. Kekurangan paling banyak terjadi pada tenaga dokter umum, promosi kesehatan, tenaga laboratorium, serta tenaga sistem informasi kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Distribusi SDM tidak merata, bukan karena tidak ada tenaga secara keseluruhan, tetapi tenaga tidak bersedia ditempatkan di wilayah terpencil, pedalaman, atau sulit akses (contoh: Tabang, Kahala, Muara Kaman), Beban kerja SDM menjadi tinggi, satu tenaga memegang beberapa program sekaligus, menyebabkan pelayanan preventif-promotif tidak optimal, Mutu pelayanan dasar menjadi terhambat, terutama dalam pelayanan ibu hamil, persalinan, gizi, imunisasi, dan pencatatan pelaporan SIK dan Dampak jangka panjang yaitu Capaian indikator kinerja seperti persentase persalinan di fasyankes, AKI/AKB, dan cakupan imunisasi menjadi rendah terutama di wilayah yang SDM-nya belum memenuhi standar.

Berdasarkan rasio tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan per 100.000 penduduk dengan jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 813.926 jiwa, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Pelayanan Kesehatan Per 1.000
Penduduk

No	Jenis Tenaga	Dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan Tahun 2022	Kebutuhan Ideal	Ketersediaan
1	Dokter	1	814	231
2	Dokter Gigi	0,2	163	62
3	Perawat	2,4	1954	1454
4	Bidan	2	1627	893
5	Tenaga Apoteker	0,91	741	208
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	1	814	137
7	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	814	62
8	Tenaga Sanitasi Lingkungan	0,21	171	46
9	Nutrisionis	0,35	285	78
10	Tenaga Epidemiologi	1	814	
11	Tenaga Radiografi	0,18	146	23
12	Tenaga ATLM	0,354	288	124
13	Tenaga Okupasi Terapi	0,015	12	18
14	Tenaga Terapi Wicara	0,015	12	10

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan oleh Kementerian, Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki kesenjangan signifikan antara kebutuhan ideal dan ketersediaan tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat.

Secara umum, hampir seluruh jenis tenaga kesehatan mengalami kekurangan dari jumlah ideal yang dibutuhkan untuk melayani jumlah penduduk. Kekurangan tenaga dokter umum dengan kebutuhan ideal sebanyak 583 orang atau sekitar 72% dari kebutuhan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan dasar, terutama di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), di mana tenaga dokter memegang peranan penting dalam diagnosis awal, rujukan, dan pengambilan keputusan klinis.

Tenaga dokter gigi juga mengalami kekurangan signifikan, yaitu hanya tersedia 62 orang dokter dari kebutuhan ideal sebanyak 163 orang (38%). Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut

belum optimal, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Kekurangan juga terjadi pada tenaga perawat dan bidan, meskipun secara persentase lebih baik dibanding tenaga dokter. Tenaga Perawat yang tersedia sebanyak 1454 orang atau 74% kebutuhan telah terpenuhi, , sedangkan tenaga bidan tersedia sebanyak 893 orang dari kebutuhan 1627 orang (55%). Baik tenaga bidan maupun perawat yang tersedia masih belum terdistribusi secara merata ke seluruh daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga beberapa puskesmas pembantu dan desa terpencil masih tidak memiliki tenaga kebidanan maupun perawat yang memadai.

Untuk tenaga apoteker dari 741 kebutuhan ideal hanya tersedia 208 tenaga (28%). Hal yang sama juga terjadi pada ketersediaan tenaga teknis kefarmasian dimana dari 814 orang kebutuhan hanya tersedia 137 orang tenaga (16,8%). Kondisi ini jelas mempengaruhi kecepatan layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu kekurangan tenaga juga terjadi pada tenaga yang menunjang kegiatan promotif dan preventif. Dimana ketersediaan Tenaga Promosi Kesehatan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisisionis, dan Tenaga Epidemiologi masih berada dibawah 50% dari rasio tenaga yang dibutuhkan.

Untuk memenuhi kekurangan yang ada Dinas Kesehatan terus melakukan upaya pemenuhan tenaga yaitu :

1. Penempatan dan Redistribusi Tenaga Kesehatan

Pemerataan distribusi tenaga kesehatan dilakukan melalui mekanisme mutasi internal dan redistribusi dari fasilitas kesehatan dengan tenaga berlebih ke fasilitas kesehatan yang kekurangan. Program penempatan tenaga kesehatan strategis, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga sanitasi lingkungan, difokuskan pada wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah sulit akses. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, jumlah penduduk, dan beban kerja di masing-masing wilayah.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan

Selain upaya kuantitatif, Dinas Kesehatan juga fokus pada peningkatan kualitas tenaga yang ada melalui pelatihan, workshop, pendidikan berkelanjutan (continuing medical education), serta fasilitasi pendidikan spesialis dan profesi tertentu yang masih

kurang. Dengan peningkatan kompetensi ini, diharapkan tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan sesuai standar.

2. Sumber Daya Sarana Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan elemen krusial dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana yang memadai mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Sebagai salah satu tolak ukur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, fasilitas kesehatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, bersama jaringan pelayanan kesehatan yang ada, memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya di bidang kesehatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.5

Sarana Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Kecamatan	SARANA KESEHATAN							
		Rumah Sakit	Puskesmas			Puskesmas Pembantu	Klinik	Praktek Dokter	Bidan Praktek Swasta
			RawatInap	Non Rawat Inap	Jumlah				
1	SAMBOJA	1 (Baik)	-	2 (Baik)	2	10 (7 Baik, 3 Rusak Ringan)	5	1	4
2	MUARA JAWA	-	1 (Baik)		1	8 (4 Baik, 2 Rusak Ringan, 2 Rusak Sedang)	4	-	-
3	SANGA SANGA	-	1 (Baik)	-	1	5 (4 Baik, 1 Rusak Ringan)	2	1	-
4	LOA JANAN	-	-	3 (Baik)	3	6 (5 baik, 1 Rusak Berat)	1	8	1
5	LOA KULU	-	-	2 (baik)	2	15 (10 Baik, 2 Rusak Ringan, 2 Rusak Sedang, 1 Rusak Berat)	-	2	2
6	MUARA MUNTAI	-	1 (Baik)	-	1	8 (7 Baik, 1 Rusak Berat)	-	-	-

No	Kecamatan	SARANA KESEHATAN							
		Rumah Sakit	Puskesmas			Puskesmas Pembantu	Klinik	Praktek Dokter	Bidan Praktek Swasta
			RawatInap	Non Rawat Inap	Jumlah				
7	MUARA WIS	-	-	1 (Baik)	1	7 (6 Baik, 1 Rusak Ringan)	-	-	-
8	KOTA BANGUN	1(Baik)	1 (Baik)	-	1	6 (Baik)	2	4	7
9	TENGGARONG	-	-	3 (Baik)	3	11 (Baik)	8	15	1
10	SEBULU	-	2 (Baik)	-	2	13 (7 Baik, 6 Rusak Ringan)	-	1	1
11	TENGGARONG SEBERANG	1 (Baik)	-	2 (Baik)	2	13 (10 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat)	5	3	-
12	ANGGANA	-	1 (Rusak Ringan)	-	1	10 (2 Baik, 2 Rusak Sedang, 6 Rusak Berat)	4	1	-
13	MUARA BADAK	1 (Baik)	2 (1 Baik, 1 Rusak Sedang)	-	2	6 (4 Baik, 1 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat)	5	4	9
14	MARANG KAYU	-	1 (Baik)	-	1	4 (3 Baik, 1 Rusak Berat)	-	-	-
15	MUARA KAMAN	-	1 (Baik)	1 (Baik)	2	17 (16 Baik, 1 Rusak Ringan)	3	-	-
16	KENOHAN	-	1 Rusak Ringan)	-	1	7 (Baik)	-	-	-
17	KEMBANG JANGGUT	-	2 (1 Baik, 1 Rusak Ringan)	-	2	10 (6 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Sedang, 1 Rusak Berat)	-	-	-
18	TABANG	-	2 (Rusak Ringan)	-	1	5 (Rusak Ringan)	-	-	-
19	KOTA BANGUN DARAT	-	1 (Baik)	-	1	7 (Baik)	-	-	-
20	SAMBOJA BARAT	-	-	1 (Rusak Berat)	1	9 (6 Baik, 3 Rusak Ringan)	-	-	5
Jumlah		4	18	14	32	175	40	40	30

Sumber: Data Dasar Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berdasarkan table 2.5 sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat diketahui terdapat 4 Rumah sakit yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan lokasi berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Samboja dan Muara Badak dengan Kondisi Baik. Sedangkan untuk Puskesmas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 32 Puskesmas dengan Kondisi baik sebanyak 26

Puskesmas, 4 Puskesmas Rusak Ringan, 1 Rusak Sedang dan 1 Rusak berat. Puskesmas dengan kondisi Rusak Berat berada di Kecamatan Samboja Barat yaitu Puskesmas Sungai Merdeka, namun pada pertengahan tahun 2025 kondisinya sudah dengan bangunan baru sehingga kondisi Puskesmas sudah dalam kondisi Baik. Dari seluruh sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih dari 50% dalam kondisi baik dan Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang ada dengan melakukan rehabilitasi sarana maupun pembangunan fasilitas kesehatan sesuai standar.

3. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara diatur setiap tahun melalui Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rincian anggaran ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA). Selain dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, pendanaan untuk pembangunan kesehatan juga bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.6
Sumber Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 – 2024

No	UNIT	SUMBER BIAYA	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	DINAS KESEHATAN	APBD	480.591.250.736,0	328.529.225.318,0	428.911.000.221,00	543.345.037.764,00	841.515.666.461,00
		a. Belanja Langsung	296.710.472.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Belanja Tidak Langsung	116.621.361.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c. Belanja Operasi	0,00	262.104.886.153,00	339.431.843.019,00	377.893.715.757,00	592.221.338.191,18
		d. Belanja Modal	0,00	19.682.064.940,00	61.962.099.287,00	165.451.322.007,00	249.294.328.269,82
		e. Dana Alokasi Khusus (DAK)	67.259.417.000,00	46.742.274.225,00	27.517.057.915,00	0,00	0,00
		APBD PROVINSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		APBN	29.220.228.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RSUD AM PARIKESIT	APBD	305.298.728.573,0	288.530.814.368,00	625.775.170.939,00	625.775.170.939,00	760.897.726.897,00
		a. Belanja Langsung	239.218.828.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Belanja Tidak Langsung	36.578.009.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c. Belanja Operasi	0,00	287.795.043.368,00	408.620.635.173,00	408.620.635.173,00	760.897.726.897,00
		d. Belanja Modal	0,00	0,00	217.154.535.766,00	217.154.535.766,00	
		e. Dana Alokasi Khusus (DAK)	28.001.891.313,00	735.771.000,00	0,00	0,00	0,00
		f. Lain-lain, BABUN/BanperKemkes	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	UNIT	SUMBER BIAYA	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	APBD	282.563.761.308,0	101.979.094.374,00	61.694.385.155,00	213.677.953.898,00	234.087.873.410,00
		a. Belanja Langsung	141.281.880.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Belanja Tidak Langsung	11.465.053.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c. Belanja Operasi	0,00	66.321.686.872,00	58.795.435.204,00	82.610.220.507,00	234.087.873.410,00
		d. Belanja Modal	0,00	0,00	2.898.949.951,00	131.067.733.391,00	0,00
		c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	129.816.827.067,00	35.657.407.502,00	0,00	0,00	0,00
4	RSUD DAYAKURAJA	APBD	81.366.979.837,00	132.188.485.586,00	116.553.500.986,00	130.512.040.698,00	213.383.868.407,00
		a. Belanja Langsung	68.851.060.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Belanja Tidak Langsung	3.585.179.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c. Belanja Operasi	0,00	131.488.485.586,00	88.865.887.025,00	97.065.282.051,00	213.383.868.407,00
		d. Belanja Modal	0,00	0,00	27.687.613.961,00	33.446.758.647,00	0,00
		c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	8.930.739.516,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANGGARAN KESEHATAN			1.149.820.720.454,0	851.227.619.646,00	1.232.934.057.301,00	1.513.310.203.299,00	2.049.885.135.175,00
APBD KABUPATEN			5.562.384.465.080,0	5.352.845.124.546,0	6.558.205.838.057,00	7.785.919.306.254,00	14.300.000.000.000,0
% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA			20,67%	15,90%	18,80%	19,44%	14,33%
ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA			1.650.182,44	1.158.944,87	1.635.488,22	2.007.407,45	2.540.243,60

Sumber: Dinas Kesehatan dan 3 Rumah Sakit Tahun 2020-2025

Pada Tabel 2.6 diatas dapat dilihat tren anggaran pertahun (2020–2024) untuk Dinas Kesehatan, RSUD Aji Muhammad Parikesit, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Dan RSUD Dayaku Raja adalah :

Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan dan RSUD memiliki alokasi pagu sebesar Rp.1.149.820.720.454,- di mana tahun awal periode menunjukkan alokasi cukup besar, dengan komposisi utama pada belanja langsung dan tidak langsung. Alokasi sektor kesehatan cukup tinggi pada awal periode, menandakan prioritas tinggi terhadap layanan kesehatan dan respons terhadap pandemi COVID-19.

Tahun 2021, Dinas Kesehatan dan RSUD memiliki pagu sebesar Rp.851.227.619.646,-. Pada tahun ini terjadi penurunan alokasi anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian fiskal dan efisiensi belanja akibat dampak pandemi serta pergeseran fokus belanja pada sektor pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, Dinas Kesehatan dan RSUD memiliki pagu sebesar Rp 1.232.934.057.301. Pada tahun ini alokasi anggaran kesehatan meningkat kembali, di mana anggaran kesehatan sangat diperlukan dalam pemulihan pasca pandemi dimulai dengan peningkatan belanja untuk sarana, SDM, dan operasional layanan kesehatan.

Di tahun 2023, Dinas Kesehatan dan RSUD memiliki pagu sebesar Rp 1.513.310.203.299. Pada tahun ini menunjukkan konsistensi peningkatan komitmen kesehatan, terutama pada belanja operasi dan pembangunan rumah sakit daerah.

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan dan RSUD memiliki pagu sebesar Rp.2.049.885.135.175. Pada tahun ini meskipun persentase alokasi anggaran kesehatan terhadap APBD menurun, tetapi total alokasi anggaran kesehatan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan Masyarakat.

a. Analisis Tren dan Interpretasi

1. Pertumbuhan Anggaran

Total anggaran kesehatan tumbuh dari Rp 1,15 triliun tahun 2020 menjadi Rp 2,05 triliun Tahun 2024 meningkat dalam lima tahun. Tren ini memperlihatkan peningkatan nyata komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sektor kesehatan, terutama pada

dua periode penting pada tahun 2022 awal dari pemulihan pasca pandemi dan tahun 2024 mengalami lonjakan besar untuk penguatan infrastruktur Kesehatan.

2. Proporsi terhadap APBD Kabupaten

Rata-rata kontribusi kesehatan terhadap total APBD selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah 17,83%, masih berada di atas standar minimal 10%. Persentase tertinggi tercatat pada tahun 2020 (20,67%), saat pandemi COVID-19, dan terendah pada tahun 2024 (14,33%), karena lonjakan besar total APBD kabupaten akibat peningkatan penerimaan daerah, meskipun proporsinya menurun, tetapi nilai riil untuk Kesehatan tetap meningkat signifikan. Ini menunjukkan peningkatan kapasitas pembiayaan layanan kesehatan bagi setiap penduduk Kutai Kartanegara sudah selaras dengan upaya peningkatan akses dan mutu layanan dasar serta rumah sakit daerah.

3. Implikasi terhadap Layanan dan Pembangunan Kesehatan

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 fokus pada penanganan pandemi dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yaitu masa pemulihan dan penguatan operasional layanan serta peralatan medis di puskesmas dan rumah sakit, dan pada tahun 2024 fase akselerasi pembangunan fisik, modernisasi layanan, dan perluasan akses kesehatan berkualitas, terutama di wilayah pinggiran.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dianalisis untuk menilai seberapa besar kontribusinya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Analisis ini mencakup daya dukung sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan periode sebelumnya (Renstra Tahun 2021-2026). Selain itu, perbandingan antara capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode sebelumnya (RPJMD Tahun 2021-2026) Kabupaten Kutai Kartanegara juga dilakukan untuk mengidentifikasi

hambatan dan permasalahan yang memerlukan antisipasi guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

Indikator Kinerja digunakan sebagai alat ukur kuantitatif untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran capaian target indikator sasaran daerah (outcome) sesuai dengan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK Outcome) yang menjadi target bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

IKK Outcome ini mencakup SPM bidang kesehatan yang telah ditetapkan sebagai indikator sasaran dan disajikan dalam Tabel 2.4. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditinjau lebih lanjut pada tabel tersebut

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
IKU																						
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				233	216	208	201	193	186	303	187	96	111	-	-	1,30	0,87	0,46	0,55	-	-
2	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup				15	13	13	13	12	12	19	13	11	13	-	-	1,27	1,00	0,85	1,00	-	-
3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)				0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,62	0,64	0,75	0,89	-	-	1,00	1,00	1,14	1,31	-	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				77,5	80	82,5	85	87,5	90	85,5	85	82,6	86,94	-	-	1,10	1,06	1,00	1,02	-	-
IKK																						
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk				1	1	1	1	1	1	0,11	0,11	1,06	0,99	-	-	0,11	0,11	1,06	0,99	-	-
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,42	91,96 %	91,36 %	93,75 %	-	-	84,42	0,92	0,91	0,94	-	-
2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,4	94,53 %	95,46 %	90,19 %	-	-	92,40	0,95	0,95	0,90	-	-

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																					
3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,08	97,24 %	93,13 %	98,22 %	-	-	94,08	0,97	0,93	0,98		
4	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,4	84,39 %	87,66 %	95,16 %	-	-	59,40	0,84	0,88	0,95		
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01 %	97,94 %	-	-	1,00	1,00	0,99	0,98		
6	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	12,62	91,94 %	94,24 %	91,88 %	-	-	12,62	0,92	0,94	0,92		
7	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,62	90,59 %	100%	87,83 %	-	-	67,62	0,91	1,00	0,88		
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,63	100%	100%	100%	-	-	34,63	1,00	1,00	1,00		

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	31,16	100%	100%	100%	-	-	31,16	1,00	1,00	1,00		
10	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,66	100,84 %	100%	100%	-	-	85,66	1,01	1,00	1,00		
11	Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,96	138,38 %	100%	100%	-	-	83,96	1,38	1,00	1,00		
12	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,13	108,98 %	100%	100%	-	-	88,13	1,09	1,00	1,00		
SPM KESEHATAN																						
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	84,42	91,96 %	91,36 %	93,75 %	-	-	84,42	0,92	0,94	0,95		
2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	92,4	94,53 %	95,46 %	90,19 %	-	-	92,40	0,95	0,95	0,90		

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,08	97,24 %	93,13 %	98,22 %	-	-	94,08	0,97	0,93	0,98		
4	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,4	84,39 %	87,66 %	95,16 %	-	-	59,40	0,84	0,88	0,95		
5	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,01 %	97,94 %	-	-	1,00	1,00	0,99	0,98		
6	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	12,62	91,94 %	94,24 %	91,88 %	-	-	12,62	0,92	0,94	0,95		
7	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	67,62	90,59 %	100%	87,83 %	-	-	67,62	0,91	1,00	0,88		
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,63	100%	100%	100%	-	-	34,63	1,00	1,00	1,00		

No.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI RENSTRA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
9	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	31,16	100%	100%	100%	-	-	31,16	1,00	1,00	1,00		
10	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	85,66	100,84 %	100%	100%	-	-	85,66	1,01	1,00	1,00		
11	Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	83,96	138,38 %	100%	100%	-	-	83,96	1,38	1,00	1,00		
12	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	88,13	108,98 %	100%	100%	-	-	88,13	1,09	1,00	1,00		

Berdasarkan dengan Tabel 2.7 diatas ada beberapa kinerja yang masih perlu mendapat perhatian atau tidak tercapainya dan mendeskripsikan penyebab dan dampak permasalahan yang dihadapi yaitu :

Pada Tahun 2021 untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan yang belum tercapai yaitu :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan balita masih sangat rendah yaitu 59,4% sangat jauh dari target tahun 2021 yaitu sebesar 100%, permasalahan penyebab rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan balita yaitu Banyak Posyandu tidak aktif, kunjungan tenaga kesehatan yang kerumah tidak dilakukan karena pembatasan pandemi COVID-19 dan Orang tua tidak mau membawa balita ke fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19, maka ini berdampak kepada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan balita masih sangat rendah serta berdampak kepada status gizi balita yang mengalami stunting dan gizi buruk yang tidak terdeteksi dini.
2. Pelayanan usia produktif 12,62%, masih sangat dibawah target 100%, permasalahan penyebab rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan usia produktif yaitu Rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukan skrining kesehatan rutin lebih fokus pada aktivitas kerja dari pada pemeriksaan kesehatan, Keterbatasan sumber daya belum semua fasyankes melaksanakan skrining penyakit tidak menular secara optimal seperti hipertensi, Diabetes Melitus, kanker serviks) dan Kurangnya inovasi promosi kesehatan yang sesuai dengan gaya hidup generasi produktif (digital campaign, media sosial, skrining di tempat kerja, dampaknya pada pelayanan usia produktif yaitu deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) masih rendah, sehingga banyak kasus hipertensi, Diabetes Melitus , kanker ditemukan dalam kondisi sudah lanjut dan Produktivitas tenaga kerja menurun akibat gangguan kesehatan yang terlambat ditangani.
3. Permasalahan AKI masih rendah capaiannya, AKB tetap tinggi meski ada perbaikan, permasalahan Penyebab nya yaitu ANC belum optimal (ibu hamil tidak periksa 6 kali), Rujukan maternal lambat (three delays), Edukasi keluarga masih kurang soal tanda bahaya

kehamilan dan Dampak nya Kematian ibu dan bayi masih jadi penyumbang utama rendahnya kualitas pelayanan dasar kesehatan.

Pada tahun 2022, beberapa indikator pelayanan kesehatan belum mencapai target 100%. Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar baru mencapai 91,96%, sedangkan ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan baru 94,53%. Pelayanan kesehatan balita juga masih rendah, yaitu 84,39%, demikian pula pelayanan kesehatan usia produktif yang hanya 91,94% dan pelayanan lansia yang 90,59%.

Permasalahan utama pada tahun 2022 adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan standar, masih tingginya persalinan yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skrining kesehatan. Faktor keterlambatan dalam penanganan kasus obstetri dan neonatal juga berkontribusi pada tingginya AKI dan AKB. Dampaknya, derajat kesehatan ibu dan anak belum membaik signifikan, dan risiko meningkatnya beban penyakit menular maupun tidak menular masih tinggi.

Pada Tahun 2023 Kinerja pelayanan kesehatan mengalami perbaikan di beberapa indikator, meski belum optimal. Persentase ibu hamil dengan pelayanan standar naik menjadi 91,36%, ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan 95,46% dan pelayanan balita meningkat menjadi 87,66%, Namun demikian, untuk AKI dan AKB sudah melebihi dari target tahun 2023, Meskipun capaian pelayanan meningkat, tetapi kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal masih menghadapi kendala. Penyebab utama adalah keterbatasan fasilitas PONEK dan PONEK, keterlambatan rujukan, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. AKI yang tinggi berdampak pada citra pelayanan kesehatan maternal, sedangkan stagnannya AKB menunjukkan belum optimalnya intervensi gizi, imunisasi, serta perawatan bayi baru lahir. Hal ini juga memperlambat pencapaian target *SDGs* bidang kesehatan.

Pada tahun 2024, terjadi dinamika capaian kinerja. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan standar menurun menjadi 93,75%, ibu bersalin turun cukup signifikan menjadi 90,19%, sementara pelayanan balita meningkat cukup baik dari pada tahun sebelumnya menjadi 95,16%, dan pelayanan lansia menurun menjadi 87,83%, Di sisi lain AKI tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya 111/100.000 Kelahiran

Hidup, dan AKB tetap stagnan di 13/1.000 Kelahiran Hidup, Permasalahan tahun 2024 adalah masih belum konsistennya capaian pelayanan dasar terutama untuk ibu hamil, persalinan, dan lansia. Penurunan capaian mengindikasikan adanya masalah keberlanjutan program, kurangnya monitoring, serta faktor eksternal seperti kesadaran masyarakat yang fluktuatif. Dampaknya, AKI dan AKB masih belum dapat ditekan sesuai target, serta risiko PTM pada usia produktif dan kualitas hidup lansia masih menjadi tantangan.

Pelayanan usia produktif naik ke 91,88%, namun belum mencapai target 100%, penyebab rendahnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan usia produktif yaitu Rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk melakukan skrining kesehatan rutin lebih fokus pada aktivitas kerja dari pada pemeriksaan kesehatan, Keterbatasan sumber daya belum semua fasyankes melaksanakan skrining penyakit tidak menular secara optimal seperti hipertensi, Diabetes Melitus, kanker serviks) dan Kurangnya inovasi promosi kesehatan yang sesuai dengan gaya hidup generasi produktif (digital campaign, media sosial, skrining di tempat kerja, dampaknya pada pelayanan usia produktif yaitu deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) masih rendah, sehingga banyak kasus hipertensi, Diabetes Militus , kanker ditemukan dalam kondisi sudah lanjut dan Produktivitas tenaga kerja menurun akibat gangguan kesehatan yang terlambat ditangani.

Permasalahan AKI masih rendah capaiannya, AKB tetap tinggi meski ada perbaikan, Penyebab nya yaitu ANC belum optimal (ibu hamil tidak periksa 6 kali), Rujukan maternal lambat (*three delays*), Edukasi keluarga masih kurang soal tanda bahaya kehamilan dan Dampak nya Kematian ibu dan bayi masih jadi penyumbang utama rendahnya kualitas pelayanan dasar kesehatan.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator penting dalam kesehatan karena mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan suatu masyarakat. AKB yang tinggi menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan ibu dan anak, gizi ibu, serta kondisi lingkungan dan ekonomi yang buruk, sehingga diperlukan upaya perbaikan untuk menurunkan angkakematian bayi.

Gambar 2.2.
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 - 2024



Gambar 2.3
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 - 2024



Dari tahun 2020 s.d 2024 telah terjadi penurunan angka kematian bayi yang signifikan dari 15/ 1000 kelahiran hidup atau jumlah kematian bayi sebanyak 186 jiwa pada tahun 2020 menurun menjadi 13/1000 kelahiran hidup atau jumlah kematian bayi sebanyak 149 jiwa. Beberapa faktor yang mendukung penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

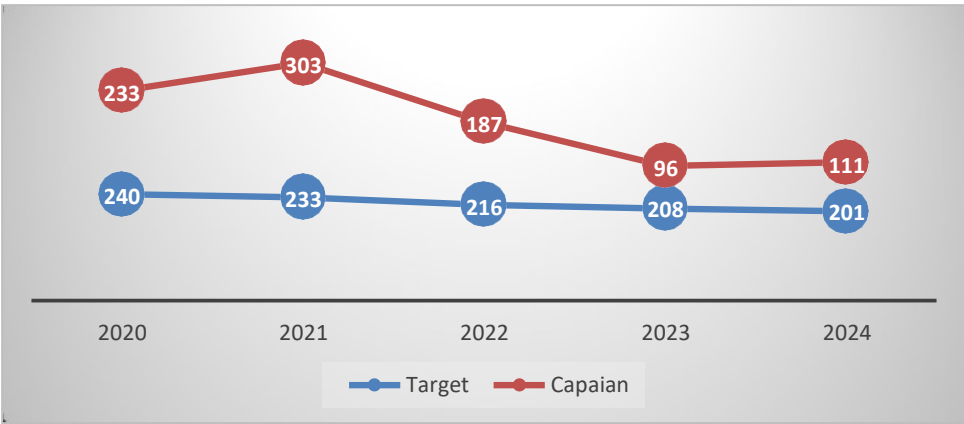
- 1) Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Pendanaan yang memadai terkait penurunan angka kematian bayi
- 3) Peningkatan Kapasitas Dokter Umum Puskesmas
- 4) Duckling Bidan
- 5) Di Dukung Oleh SK AMP Dan Pelaksanaan AMP Pada Setiap Kasus Kematian

- 6) Pelayanan Dokter Spesialis Anak dan Spesialis Obgyn ke Kecamatan secara berkala
- 7) Duck And Duckling Anak Terfokus.
- 8) Pelayanan Bersalin Dan Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar.
- 9) Sistem Rujukan Berjalan Baik (Hotline Dan Logbook Rujukan).
- 10) Feedback Rujukan Neonatal.
- 11) AMP-SR Tingkat Puskesmas dan Triwulan Kabupaten.
- 12) Adanya dukungan Organisasi Profesi, Puskesmas, Rumah Sakit dan lintas sektor terkait.

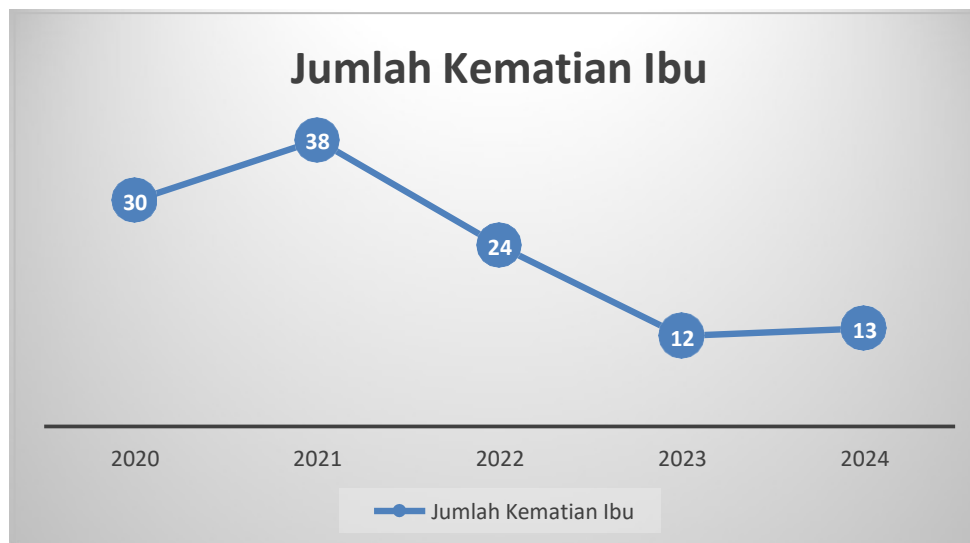
b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam menilai kualitas sistem pelayanan kesehatan maternal di suatu wilayah. AKI yang tinggi menunjukkan adanya permasalahan pada akses, mutu, dan keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu, terutama saat kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Oleh karena itu, penurunan AKI menjadi salah satu sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan.

Gambar 2.4
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 – 202



Gambar 2.5
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020 - 2024



Dari tahun 2020 s.d 2024 telah terjadi penurunan angka kematian ibu yang signifikan dari 233/10.000 kelahiran hidup atau jumlah kematian ibu sebanyak 30 jiwa pada tahun 2020 menurun menjadi 111/10.000 kelahiran hidup atau jumlah kematian ibu sebanyak 13 jiwa. Penurunan angka kematian ibu dari target ini adalah hasil yang sangat baik, dan menunjukkan bahwa pencapaian jauh melebihi target yang ditetapkan.

Adapun faktor pendukung menurunnya angka kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan / Anggaran yang mencukupi.
2. Adanya dukungan Organisasi Profesi, Puskesmas, Rumah Sakit dan lintas sektor terkait
3. Adanya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Di Dukung Oleh SK AMP Dan Pelaksanaan AMP Pada Setiap Kasus Kematian
5. Pelayanan Dokter Spesialis Kebidanan,
6. Duck And Duckling Maternal Terfokus.
7. Skrining Ibu Hamil (Srikandie Dan Indeks Rujukan)
8. Pelayanan Bersalin Sesuai Dan Pelayanan Nifas Sesuai Standar.
9. Sistem Rujukan Berjalan Baik (Hotline Dan Logbook Rujukan).
10. Feedback Rujukan.
11. Pelatihan Blended Learning Dokter Umum
12. Pelatihan Gadar Matneo

c. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

IPKM merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat di suatu wilayah, Dalam menentukan peringkat kabupaten/kota dalam pembangunan kesehatan di susunlah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yaitu indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Ada 57 indikator kesehatan yang digunakan dalam IPKM dengan nilai korelasi UHH yang tertinggi.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar 0,89 persen, yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara yaitu sebesar 0,68. Keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Kutai Kartanegara tidak lepas dari dukungan komitmen dan integritas manajemen dan penyelenggara kegiatan, selain itu adanya sinkronisasi data dan kolekting data yang sudah semakin baik, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat. Selain faktor pendukung ada pula faktor penghambat dalam pencapaian indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM). Dimana kualitas dan ketertiban penginputan data dan bahan yang masih kurang, sehingga mempengaruhi kualitas data yang diperoleh untuk menghasilkan nilai IPKM.

Gambar 2.6

**Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 – 2024**



Capaian IPKM tahun 2024 adalah 0,89, dimana lebih tinggi dari capaian di tahun 2021 yang hanya sebesar 0,62. Dengan realisasi yang telah melampaui target akhir Renstra, upaya selanjutnya dapat difokuskan pada mempertahankan dan memperluas dampak positif pembangunan kesehatan masyarakat. Yang merupakan faktor pendukung dalam Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, meliputi peningkatan kualitas layanan kesehatan (seperti fasilitas, tenaga kesehatan, dan jaminan biaya), penciptaan lingkungan sehat (berperilaku hidup bersih dan sehat, akses air bersih), serta dukungan kebijakan dan kemitraan dari pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta melalui program inovatif.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya. Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yaitu indeks kepuasan pelayanan kesehatan masyarakat.

Gambar 2.7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021 – 2024



Capaian IKM tahun 2024 adalah 86,94, dimana lebih tinggi dari capaian di tahun 2021 yang hanya sebesar 85,5. Capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat, karena tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga sedikit melebihi ekspektasi yang ada.

Faktor pendukung keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencakup aspek pelayanan seperti kemudahan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan produk layanan, serta aspek petugas seperti kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, dan keramahan. Selain itu, faktor sarana dan prasarana serta pengelolaan pengaduan dan masukan juga krusial untuk keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2026

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	439.056.338.070	325.707.540.204	1.008.014.017.001	1.013.497.323.650	1.067.586.333.161	903.383.462.000	881.760.047.948	138.343.914.164	273.168.653.167	563.823.313.399	803.984.692.577	901.709.722.595	-	-		83,87%	55,93%	79,33%	84,46%	-	-	59,12%	76,70%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	347.435.207.225	494.197.440.958	232.551.120.754	593.209.939.259	967.478.549.874	794.738.531.735	432.777.490.899	225.434.926.484	419.893.255.386	200.296.165.808	554.102.846.770	886.415.152.197	-	-		84,96%	86,13%	93,41%	91,62%	-	-	20,27%	37,03%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.097.257.600	1.010.778.850	2.849.988.000	6.488.789.000	6.022.667.900	5.643.103.500	4.350.000.000	979.748.345	779.558.352	2.115.423.876	4.979.825.444	4.518.226.672	-	-		77,12%	74,23%	76,75%	75,02%	-	-	152,76%	159,86%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	529.507.400	183.691.000	544.792.000	335.500.000	628.114.000	393.500.000	730.000.000	322.484.400	105.880.000	329.920.000	292.128.100	481.809.000	-	-		57,64%	60,56%	87,07%	76,71%	-	-	38,07%	118,35%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.418.772.800	2.925.055.400	3.637.714.000	4.677.551.160	3.619.138.900	3.371.682.000	8.525.000.000	2.862.291.929	2.677.398.339	2.753.801.123	3.634.577.685	2.657.702.235	-	-		91,53%	75,70%	77,70%	73,43%	-	-	5,09%	-0,25%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
DINAS KESEHATAN																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.917.629.218,65	160.707.079.182	210.421.535.334	224.721.221.057	408.659.924.139	385.852.206.292	-	47.211.593.514	156.517.587.093	185.864.796.319	206.258.914.102	365.096.070.567	-	-			88,33%	91,78%	89,34%	-	-	27,79%	32,14%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	251.458.816.994	119.644.321.661	190.239.900.972	331.685.526.047	437.839.102.522	425.278.437.780	-	176.269.687.942	94.382.287.787	167.759.528.323	306.329.890.240	382.517.331.009	-	-			88,18%	92,36%	87,36%	-	-	41,18%	42,67%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.300.000.000	823.099.850	1.050.000.000	4.098.685.000	3.424.526.900	3.600.896.000	-	657.481.950	603.828.400	417.228.390	2.871.669.117	2.188.643.967	-	-			39,74%	70,06%	63,91%	-	-	80,98%	141,52%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	529.507.400	183.691.000	544.792.000	335.500.000	628.114.000	393.500.000	-	322.484.400	105.880.000	329.920.000	292.128.100	481.809.000	-	-			60,56%	87,07%	76,71%	-	-	-9,26%	15,35%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	868.772.800	428.759.400	1.137.714.000	2.177.551.160	1.619.138.900	1.100.000.000	-	526.820.300	302.349.000	745.886.930	1.862.003.664	1.426.296.733	-	-			65,56%	85,51%	88,09%	-	-	-1,10%	30,41%
RSUD AM PARIKESIT																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	223.112.528.406	65.536.620.106	605.120.151.844	666.090.030.517	473.950.709.045	370.370.044.541	257.269.899.949		61.534.021.411	276.036.513.918	457.104.618.610	431.544.491.626	-	-			45,62%	68,63%	91,05%	-	-	-12,93%	18,78%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	43.075.771.037	279.133.159.450	15.655.019.095	144.896.594.692	286.947.017.852	54.165.558.640	92.446.338.749		236.526.247.342	13.138.259.699	136.751.180.385	272.406.766.067	-	-			83,92%	94,38%	94,93%	-	-	82,00%	657,80%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.021.312.761	41.300.177.399	101.333.955.230	111.577.069.507	76.856.722.567	74.479.332.238	83.054.023.520	68.359.169.210	31.677.527.302	59.440.261.863	92.148.843.027	67.938.513.300	-	-	94,92 %	76,70 %	58,66 %	82,59 %	88,40 %	-	-	-8,83%	4,77%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	24.673.686.529	76.460.568.422	3.741.074.294	100.210.780.391	74.845.053.140	189.436.699.368	700.000.000	23.831.851.702	71.174.765.289	555.927.806	97.884.575.573	69.273.747.313	-	-	96,59 %	93,09 %	14,86 %	97,68 %	92,56 %	-	-	1654,57%	4120,31%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	157.574.400	187.679.000	1.799.988.000	1.890.104.000	1.998.141.000	1.384.326.500	-	151.040.200	175.729.952	1.698.195.486	1.814.050.586	1.809.436.548	-	-	95,85 %	93,63 %	94,34 %	95,98 %	90,56 %	-	-	-7,70%	2,18%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-							RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-			-	-	-	-	-	-	-
RSUD DAYAKU RAJA																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.004.867.685	58.163.663.517	91.138.374.593	11.109.002.569	108.118.977.410	72.681.878.929	23.112.566.073	22.773.151.440	23.439.517.361	42.481.741.299	48.472.316.838	37.130.647.102	-	-			46,61 %	436,33 %	34,34 %	-	-	-6,75%	-4,20%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.226.932.665	18.959.391.425	22.915.126.393	16.417.038.129	167.847.376.360	125.857.835.947	5.500.000.000	25.333.386.840	17.809.954.968	18.842.449.980	13.137.200.572	162.217.307.808	-	-			82,23 %	80,02 %	96,65 %	-	-	149,74%	253,64%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-							REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	639.683.200	0	0	500.000.000	600.000.000	657.881.000	0	171.226.195	0	0	294.105.741	520.146.157	-	-			0,00 %	58,82 %	86,69 %	-	-	10,53%	25,62%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-			0,00 %	0,00%	0,00 %	-	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.550.000.000	2.496.296.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.000.000.000	2.271.682.000	1.500.000.000	2.335.471.629	2.375.049.339	2.007.914.193	1.772.574.021	1.231.405.502	-	-			80,32 %	70,90 %	61,57 %	-	-	-3,04%	-12,89%

Sumber: Dinas Kesehatan dan 3 Rumah Sakit Tahun 2020-2025

Dapat dilihat dari Tabel 2.7 diatas Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu untuk tahun 2020 uraian program kegiatan mengikuti nomenklatur yang lama sehingga tidak dapat dilihat anggaran dan realisasinya sehingga masih ada data yang kosong dikarenakan masuk kedalam program atau pendanaan BLUD Rumah sakit Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Tantangan-tantangan ini meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kesehatan, serta kebutuhan untuk mengatasi disparitas akses pelayanan di wilayah-wilayah tertentu. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengembangkan pelayanan kesehatan, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang ada sekaligus merumuskan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Bagian ini akan mengulas secara rinci tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan, serta peluang yang dapat dimaksimalkan untuk pengembangan pelayanan di masa mendatang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran, tenaga kesehatan, maupun infrastruktur, menjadi kendala utama. Selain itu, disparitas akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sulit dijangkau memperumit penyelenggaraan layanan yang merata. Tantangan ini memerlukan pendekatan strategis untuk memastikan layanan kesehatan yang efektif dan berkeadilan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi:

1. Derajat Kesehatan (Status Kesehatan Masyarakat)
 - a. Belum optimalnya upaya penurunan kematian ibu, neonatal, bayi, dan balita.
 - b. Ancaman penyakit menular baru, re-emerging disease di tengah dinamika mobilitas penduduk yang meningkat dan penyakit menular yang berbasis lingkungan.

- c. Peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes, yang memerlukan intervensi berbasis komunitas.
 - d. Permasalahan gizi masyarakat yang masih kompleks, termasuk malnutrisi, over nutrisi dan anemia.
 - e. Masih perlunya peningkatan edukasi dan media KIE dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Sumber Daya Kesehatan
- a. Terbatasnya kemampuan dalam pemenuhan standar kompetensi pelayanan di Puskesmas, jejaring dan RSUD yang sesuai regulasi.
 - b. Kesenjangan ketersediaan, pemerataan dan kompetensi baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, tenaga pendukung dan penunjang kesehatan.
 - c. Kurangnya kapasitas tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung dan penunjang kesehatan untuk menghadapi kebutuhan pengembangan layanan.
 - d. Keterbatasan dalam pengelolaan aset kesehatan seperti tanah dan bangunan untuk pengembangan fasilitas.
 - e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, obat, BMHP terutama di Puskesmas, jejaring dan RSUD.
 - f. Munculnya kompetitor pelayanan kesehatan swasta yang memiliki fasilitas dan layanan lebih baik.
 - g. Keterbatasan alokasi dan pengelolaan pembiayaan kesehatan.
3. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
- a. Penyediaan dan pengelolaan data kesehatan yang belum terintegrasi dan real-time, yang sangat mempengaruhi kecepatan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Banyaknya aplikasi yang dipergunakan dan tidak terintegrasi dengan baik.
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
- a. Sinkronisasi kebijakan, program, dan anggaran lintas sektor yang belum optimal dalam mendukung pembangunan kesehatan.
 - b. Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat terutama dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Di tengah berbagai tantangan, terdapat peluang signifikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi

dengan pihak swasta dan masyarakat membuka ruang inovasi dalam pelayanan kesehatan. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan. Peluang utama yang dapat dimanfaatkan meliputi:

1. Derajat Kesehatan (Status Kesehatan Masyarakat)
 - a. Adanya peningkatan upaya rujukan dan peningkatan kapasitas tenaga dalam upaya penurunan kematian ibu, neonatal, bayi dan balita.
 - b. Adanya peningkatan upaya penanggulangan penyakit menular berbasis lingkungan dan penyakit tidak menular
 - c. Adanya keterlibatan lintas sektor dalam penanganan kasus malnutrisi, overnutrisi dan anemia
 - d. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS
 - e. Kesempatan untuk memperluas cakupan imunisasi dan pencegahan penyakit berbasis komunitas.
 - f. Adanya kemajuan dalam teknologi medis yang mendukung deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
 - g. Potensi kerja sama dengan lembaga internasional dan LSM dalam penanganan isu kesehatan masyarakat.
2. Sumber Daya Kesehatan
 - a. Adanya kerjasama dengan Perguruan tinggi dan rumah sakit jejaring untuk memenuhi standar pemenuhan SDM dalam pemenuhan standar kompetensi pelayanan
 - b. Adanya penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dari Kementerian Kesehatan
 - c. Adanya perbedaan insentif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah terpencil
 - d. Adanya alokasi sumber pembiayaan untuk peningkatan kapasitas tenaga
 - e. Dikembangkannya sistem informasi dalam pengelolaan aset,
 - f. Mudah nya akses pelayanan kesehatan dengan muncul nya fasilitas pelayanan kesehatan swasta
 - g. Adanya penentuan prioritas pembangunan kesehatan
 - h. Ada regulasi tentang standar kompetensi pelayanan di Puskesmas, jejaring dan RSUD

- i. Dukungan pemerintah untuk distribusi tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat dan bantuan tenaga kesehatan kontrak daerah.
 - j. Kesempatan untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.
 - k. Potensi pengembangan infrastruktur kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan dana CSR dari perusahaan di wilayah Kutai Kartanegara.
 - l. Adanya insentif bagi tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah terpencil.
 - m. Peningkatan anggaran kesehatan dari baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya dalam program penurunan stunting dan gizi buruk.
3. Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
- a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan
 - b. Adanya inisiasi integrasi data kesehatan melalui platform nasional
 - c. Dukungan digitalisasi pelayanan kesehatan dari pemerintah pusat dan daerah.
 - d. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan integrasi data kesehatan secara real-time. Peluang pengembangan aplikasi berbasis digital untuk mempermudah monitoring dan evaluasi program kesehatan.
 - e. Adanya fokus nasional pada penguatan sistem informasi kesehatan melalui platform seperti SATU SEHAT.
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
- a. Adanya dukungan anggaran dari pihak pemerintah dan swasta.
 - b. Adanya dukungan kebijakan dan regulasi baik terkait langsung dengan pelayanan, ketenagaan, pembiayaan, keterlibatan masyarakat dan lintas sektor
 - c. Adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat, perangkat desa dan perangkat daerah dalam pelaksanaan GERMAS
 - d. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi lintas sektor melalui RPJMD.
 - e. Peluang pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
 - f. Potensi penguatan kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan komunitas dalam program kesehatan.

- g. Ketersediaan dana desa yang dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan di tingkat lokal.
- h. Adanya perhatian nasional terhadap isu kesehatan lingkungan dan pengendalian risiko akibat perubahan iklim.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan merupakan pihak-pihak yang menjadi faktor utama dalam pelaksanaan program dan kebijakan kesehatan. Kelompok sasaran dikelompokkan berdasarkan pendekatan sistematis untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat serta institusi yang berperan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan.

Adapun kelompok sasaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan kategori sebagai berikut :

1. Mikrosistem (Individu dan Keluarga)
Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Anak Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Lansia, penderita Hipertensi, penderita Diabetes Melitus, orang dengan Gangguan Jiwa Berat, orang terduga Tuberkulosis dan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.
2. Mesosistem (Komunitas dan Kelompok Sosial)
Sekolah, Posyandu dan lingkungan kerja
3. Ekosistem (Fasilitas Kesehatan dan Infrastruktur)
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik, dan Rumah Sakit
4. Makrosistem (Kebijakan dan Sistem Kesehatan)
Pemerintah Daerah, Pengambilan Kebijakan, Lembaga Lintas Sektor.

2.1.5. Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Perangkat Daerah Terkait
Dalam melaksanakan tupoksi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat berdiri sendiri, tetapi ada kerja sama dengan Perangkat Daerah lain diantaranya yaitu
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - b. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Inspektorat
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD),

- g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP2KB),
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A),
- i. Dinas Sosial,
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Satuan Pamong Praja
- l. Dinas Pertanian dan Peternakan
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan
- n. Dinas Pekerjaan Umum
- o. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- p. Dinas Perumahan dan Permukiman
- q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- s. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- t. Kementerian Agama
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- v. TNI POLRI
- w. BPBD
- x. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- y. Dinas Komunikasi dan Informasi
- z. Kecamatan dan Pemerintah Desa
- aa.Universitas Kutai Kartanegara (UNIKARTA)

2. BPJS

BPJS menjadi Mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat baik secara mandiri maupun PBI dengan sinergi yang baik, dapat mencapai tujuan bersama dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJS selaku mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.

3. Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda

Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam menjadi mitra Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan rujukan bagi pasien dengan gangguan jiwa berat yang ditemukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Organisasi Kemasyarakatan

- a. PKK
- b. Darma Wanita

- c. Gabungan Organisasi Wanita
- d. Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis (PPTI)
- e. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)
- f. Palang Merah Indonesia (PMI)
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- h. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kutai Kartanegara
- i. Yayasan Jantung Sehat
- j. Praja Muda Karana (Pramuka)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan di dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Aspek pelayanan umum dalam Bidang Kesehatan pada pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan, masih ditemukan beberapa kinerja pelayanan yang belum mencapai target. Dari beberapa hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dan perlu untuk menjadi perhatian, sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diidentifikasi sebagai dasar perbaikan kinerja pelayanan di bidang kesehatan. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 2.9

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara**

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB).	1. Kondisi Geografis dimana masyarakat susah untuk mencapai Akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Kapasitas dan keterlibatan Dokter Umum dalam pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir dan kebidanan yang belum maksimal 3. Kapasitas dan Fasilitas RSUD Kurang untuk menangani bayi Kecil (BBLR dan Prematur) terkait NICU, obat dan alat. 4. Keterbatasan tenaga dokter Spesialis (SpOG, SpA, Anestesi)
	Tingginya prevalensi penyakit menular	1. Belum Optimalnya edukasi kesehatan pada masyarakat 2. Sanitasi lingkungan yang buruk di beberapa wilayah. 3. Keterbatasan cakupan imunisasi dan program pencegahan penyakit. 4. Kurangnya pengelolaan limbah domestik dan industri. 5. Tingginya mobilitas penduduk tanpa pemeriksaan kesehatan yang memadai.
	Peningkatan kasus penyakit tidak menular	1. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat (kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tidak sehat). 2. Kesadaran untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin masih rendah. 3. Tingginya konsumsi rokok dan alkohol. 4. Kurangnya akses program promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit tidak menular. 5. Penyediaan layanan kesehatan khusus penyakit tidak menular belum memadai.
	Tingginya prevalensi stunting pada anak balita.	1. Pemahaman masyarakat tentang gizi yang rendah. 2. Akses pangan bergizi dan air bersih terbatas di beberapa wilayah. 3. Pengelolaan program posyandu kurang aktif. 4. Kurangnya intervensi gizi spesifik dan sensitif.
	Disparitas akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.	1. Infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai di daerah terpencil. 2. Jaringan komunikasi dan teknologi informasi di wilayah terpencil masih terbatas.
	Belum optimalnya standar pelayanan rujukan berbasis kompetensi	1. Belum lengkapnya standar ketenagadalam pemenuhan standar pelayanan berbasis kompetensi. 2. Belum terpenuhinya standar sarana, prasarana dan peralatan kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan dan penunjang berbasis kompetensi. 3. Belum optimalnya komunikasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		4. Masih terdapat kendala terkait aspek geografis dan aksesibilitas untuk menjangkau fasilitas rujukan sesuai standar
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terhadap program bidang kesehatan. 2. Belum optimalnya sosialisasi terkait program kesehatan kepada lintas sektor terkait. 3. Belum optimalnya advokasi tentang program kesehatan kepada lintas sektor.

B. Telaahan Visi, Misi Jangka Menengah dan Indikator Utama Pembangunan Daerah

Visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya visi tersebut melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan bidang tugasnya, yaitu sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan.

VISI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 – 2029 KUKAR IDAMAN TERBAIK

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Visi ini berorientasi pada pencapaian keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menempatkan Kutai Kartanegara sebagai pusat inovasi di sektor pangan, pariwisata, dan industri berbasis hijau, yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata. Lebih lanjut, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 8 (delapan) kunci yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi di atas. Hal ini tertuang didalam Misi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

MISI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 - 2029:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi RPJMD, khususnya misi pertama, yaitu

“Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.”

Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab dalam

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk mendorong transformasi sosial melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Transformasi sosial tersebut diwujudkan melalui perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sumber daya kesehatan, serta penanganan isu-isu strategis seperti stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan, Dinas Kesehatan berperan langsung dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing guna mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan secara makro, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam mendukung pencapaian beberapa Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang terkait langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indikator-indikator ini mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan efektivitas intervensi kesehatan yang dilakukan. Beberapa IUP yang menjadi fokus utama meliputi:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi, Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan kinerja pada masing-masing indikator ini untuk mendukung transformasi sosial yang selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2.2. Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, isu strategis diidentifikasi berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aspek berikut:

- a. Evaluasi Kinerja Sebelumnya yang mengacu pada capaian dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode 2021-2026.
- b. Tantangan dan Peluang yang merujuk pada tantangan dan peluang yang telah diidentifikasi dalam konteks kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, sistem informasi, dan dukungan lintas sektor.
- c. Kebijakan Nasional dan Daerah melalui sinkronisasi dengan arah kebijakan kesehatan nasional seperti RPJMN, Program Indonesia Sehat, serta RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Tren Global dan Lokal dengan mempertimbangkan isu-isu kesehatan baru,

seperti dampak perubahan iklim, urbanisasi, dan perkembangan teknologi kesehatan.

Berdasarkan analisis tersebut, isu strategis untuk periode 2025- 2029 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
 1. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.
 2. Penanganan stunting dan masalah gizi lainnya secara terintegrasi.
 3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidakmenular.
- b. Penguatan Sistem Layanan Kesehatan
 1. Pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil dan marginal.
 2. Optimalisasi sistem rujukan dan telemedicine untuk mendukung layanan yang berkesinambungan.
 3. Peningkatan kualitas dan cakupan fasilitas kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
 1. Rekrutmen dan distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan kompetensi sesuai kebutuhan lokal.
 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan.
 3. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk alat kesehatan modern.
- d. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
 1. Integrasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi program kesehatan.
- e. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesehatan
 1. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan.
 2. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung layanan kesehatan ditingkat lokal.
 3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Dengan mengidentifikasi isu strategis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara akan memiliki panduan yang lebih terarah dalam merancang program dan kebijakan kesehatan yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan.

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di sebagian besar wilayah kabupaten 2. Banyaknya potensi pendanaan melalui CSR Bidang Kesehatan	1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya kesehatan 2. Peran lintas sektor yang belum maksimal dalam mendukung kesehatan 3. Belum optimalnya penuntasan prevalensi stunting 4. Kurangnya keterbukaan masyarakat terkait TBC 5. Ketidakstabilan kontinuitas implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6. Angkakematian ibu (AKI) dan balita (AKABA) 7. Tingginya prevalensi penyakit menular 8. Peningkatan kasus penyakit tidak menular 9. Belum optimalnya pemenuhan	1. Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat 2. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat 3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. Penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes dan penyakit jantung yang terus meningkat, terutama di kalangan lansia dan usia muda dengan gaya Hidup kurang sehat; 2. transformasi digital dalam sistem Kesehatan yang semakin pesat, termasuk penggunaan teknologi untuk catatan medis elektronik (EMR) dan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP); 3. peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.	1. penurunan angka stunting, 2. angka kematian ibu dan bayi, 3. perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 4. penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan, serta 5. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 6. Program Pemerintah tentang pemeriksaan kesehatan gratis 7. Kebijakan terkait penyelarasan rencana induk bidang Kesehatan (RIBK) pada dokumen RPJMD dan renstra PD	1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas. 2. Masih tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan balita. 3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. 4. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular 5. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar 6. Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah tertentu 7. Program Gubernur tentang pelayanan kesehatan gratis 8. Komitmen kepala daerah terhadap penguatan	1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: a. Penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita melalui penguatan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. b. Penanganan stunting dan masalah gizi lainnya secara terintegrasi. c. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 2. Penguatan Sistem Layanan Kesehatan. a. Pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil dan marginal. b. Optimalisasi sistem rujukan dan telemedicine untuk mendukung layanan yang berkesinambungan. c. Peningkatan kualitas dan cakupan fasilitas kesehatan sesuai dengan Standar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	standar pelayanan rujukan berbasis kompetensi 10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat				infrastruktur	Pelayanan Minimal (SPM). 3. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan a. Rekrutmen dan distribusi tenaga kesehatan yang merata dengan kompetensi sesuai kebutuhan lokal. b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. c. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk alat kesehatan modern 4. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan a. Integrasi data kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. b. Pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi program kesehatan. 5. Kolaborasi Lintas Sektor

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						untuk Kesehatan: a. Penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program kesehatan. b. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung layanan kesehatan di tingkat lokal. c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Telaahan Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan andal Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan merupakan isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat luas wilayahnya yang mencakup daerah pesisir, pedalaman, dan perbukitan. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pembangunan infrastruktur harus tidak hanya difokuskan pada wilayah-wilayah strategis atau padat penduduk, tetapi juga diarahkan ke wilayah pinggiran dan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan pelayanan dasar yang mendesak

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan memiliki 42 Indikator, 3 indikator diantaranya adalah indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Beberapa hal yang dapat menjadi penghambat kinerja pelayanan kesehatan antara lain belum maksimalnya fasilitas medis dan infrastruktur, kualitas air yang buruk dan sanitasi yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko infeksi, kondisi geografis Kutai Kartanegara yang luas menyebabkan akses layanan darurat yang kurang optimal sehingga indikator yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai. Namun hal utama yang menjadi pendorong dalam memenuhi indikator tujuan pembangunan berkelanjutan adalah adanya dukungan maksimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui dukungan berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi, penerapan teknologi ramah lingkungan serta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kesehatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan merealisasikan tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam mendukung perwujudan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan adalah:

“Terbaik dalam mewujudkan Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial”

Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan Tujuan Renstra yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan lima tahun ke depan, dengan mengacu pada kewenangan yang telah diatur dalam RPJMD.

TUJUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029:

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

INDIKATOR TUJUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029:

“USIA HARAPAN HIDUP (UHH)”

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RENSTRA
Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025 – 2029

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat							
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkarakter							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,39	74,45	74,51	74,57	74,63	74,69

Tujuan Pembangunan Kesehatan lima tahun ke depan adalah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Tujuan ini sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2029. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tidak hanya diartikan sebagai penurunan angka kesakitan, angka kematian ibu dan anak, maupun pengendalian penyakit menular dan tidak menular, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Dengan demikian, tujuan ini berorientasi pada pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal, merata, dan berkeadilan.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Tujuan ini juga menekankan pada peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan daerah, serta perbaikan determinan sosial kesehatan seperti lingkungan, gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta jaminan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi pemanfaatan bonus demografi, serta penurunan beban biaya kesehatan akibat penyakit. Dengan demikian, kesehatan dipandang sebagai modal utama pembangunan dan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.2. Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**, maka ditetapkan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sasaran ini dirumuskan secara spesifik sebagai arah capaian Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara serta sejalan dengan Pembangunan Kesehatan nasional. Adapun Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat***
- 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan***

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk menurunkan angka kematian ibu, balita dan penurunan prevalensi Stunting pada balita melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan cakupan pelayanan antenatal, persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, pelayanan pasca persalinan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi penerus serta mengurangi kesenjangan kesehatan antar wilayah.

Indikator Sasaran 1.

- 1. Jumlah Kematian Ibu***
- 2. Jumlah Kematian Balita***
- 3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita***

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berhubungan dengan mutu layanan kesehatan. Dimana pemerintah daerah berkomitmen dalam pemenuhan dan pemerataan layanan dasar salah satunya yaitu layanan kesehatan melalui pembangunan dan pemerataansarana prasarana kesehatan, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, serta optimalisasi layanan kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, peningkatan mutu pelayanan dilakukan dengan penerapan standar pelayanan minimal, akreditasi fasilitas kesehatan, serta pemanfaatan teknologi digital kesehatan. Dengan langkah tersebut, masyarakat, termasuk kelompok rentan dan miskin, memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan bermutu.

Indikator Sasaran 2.***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,33	74,39	74,45	74,51	74,57	74,63	74,69	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	13	13	13	13	13	13	12	
			Jumlah Kematian Balita (Orang)	167	167	167	166	165	160	151	
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita (%)	14,2	14,1	14	13,45	12,58	11,76	10,99	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	

Dapat dilihat pada Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 yaitu Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 tidak hanya berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, tetapi juga mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan kesehatan selama lima tahun terakhir.

Evaluasi capaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan ke depan, agar program dan kegiatan yang disusun benar-benar menjawab permasalahan serta memperkuat capaian yang telah berhasil diraih. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan kesehatan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Selain memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah serta arah kebijakan RPJMD, **penetapan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan juga dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun sebelumnya (periode 2020–2024).** Evaluasi ini menjadi acuan dalam menentukan tingkat realisme dan ambisiusitas target, dengan memperhatikan tren capaian indikator utama, kapasitas sumber daya, serta kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, target-target yang ditetapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi berbasis data capaian dan pembelajaran dari periode sebelumnya.

Pertimbangan terhadap capaian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain:

1. pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan
2. peningkatan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita
3. percepatan penurunan stunting
4. peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
5. penguatan sistem informasi serta tata kelola pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Kesehatan menetapkan tujuan utama yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** sebagai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, yaitu **“Meningkatnya kualitas sumber daya**

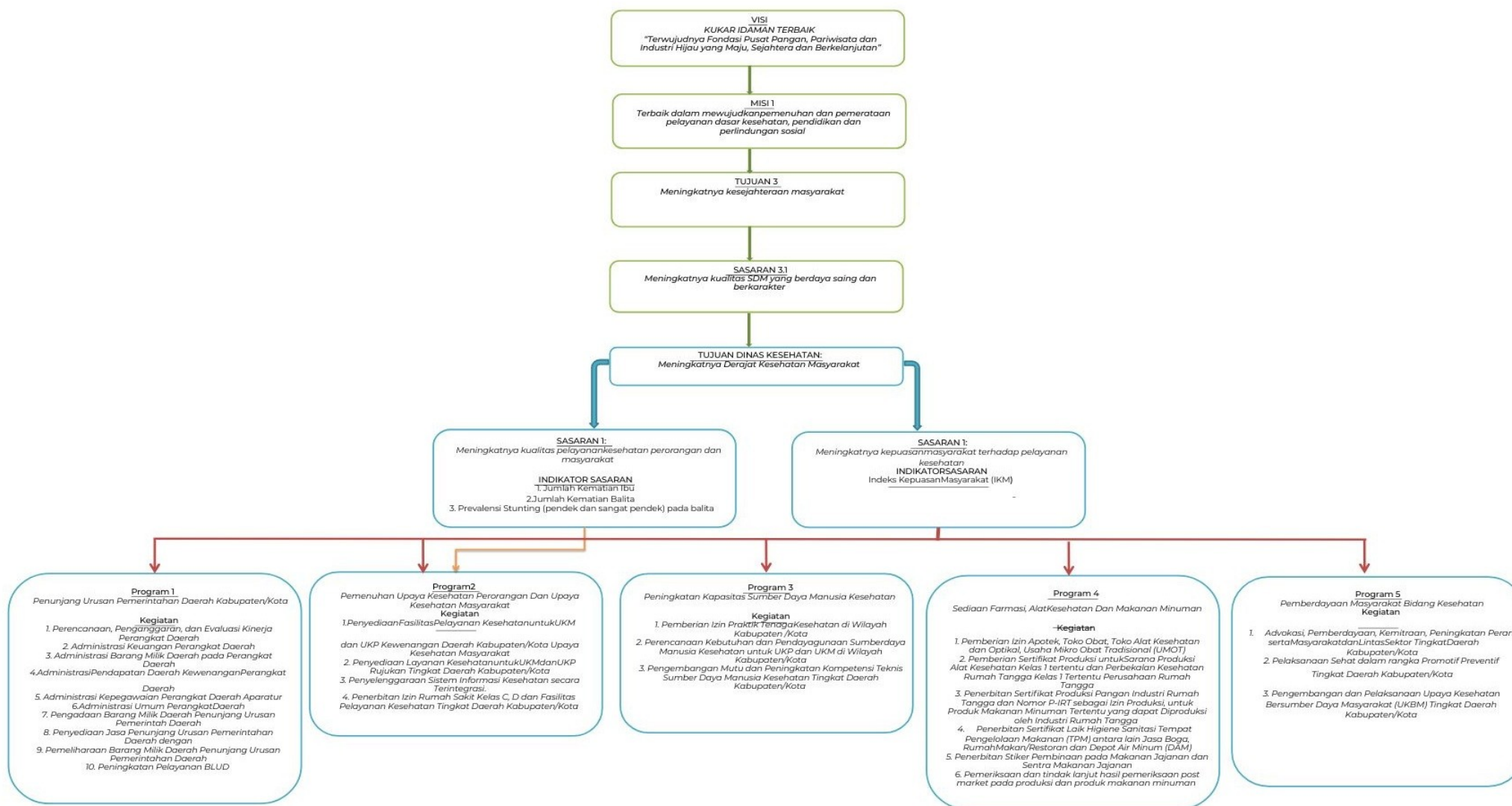
manusia yang berdaya saing dan berkarakter.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, yang tercermin dari penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian balita, serta penurunan prevalensi stunting
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sebagai ukuran peningkatan mutu dan profesionalisme pelayanan kesehatan daerah.

Selanjutnya, target tujuan dan sasaran dirumuskan dengan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline, sehingga arah pencapaian kinerja pada periode 2025–2029 memiliki dasar yang terukur dan realistis sesuai kondisi aktual pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3.1
Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara



Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan layanan kesehatan dasar dan gizi masyarakat, melalui : 1. Peningkatan Capaian SPM 2. Perencanaan, peningkatan dan distribusi tenaga Kesehatan 3. Penguatan Sistem informasi kesehatan 4. Ketersediaan Farmasi, alat kesehatan dan pengawasan makanan dan minuman 5. Penyediaan pembiayaan kesehatan (JKN) 6. Akselerasi Penurunan Prevalensi Balita Stunting	Perluasan akses pelayanan dasar, melalui : 1. Pembangunan/ rehabilitasi fasilitas kesehatan 2. Pemenuhan dan peningkatan sumber daya kesehatan (SDM, sarana prasarana dan alat kesehatan) 3. Peningkatan promosi Kesehatan serta pemberdayaan peran Masyarakat dan kader kesehatan	Peningkatan mutu kesehatan, melalui : 1. Peningkatan Mutu dan Perizinan Fasilitas pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan layanan kesehatan lingkungan dan air bersih 3. Akselerasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular 4. Penguatan Regulasi sistem kesehatan daerah	Perwujudan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing, melalui : 1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan 2. Peningkatan kapasitas SDM dalam transformasi digital	Konsolidasi dan pemantapan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, dan penguatan kelembagaan dan tata kelola kesehatan daerah serta kolaborasi multisektoral

Tabel 3.4

Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dasar, dan gizi masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	
			Meningkatkan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
			Meningkatkan Layanan Perizinan Rumah Sakit serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	
			Meningkatkan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
			Meningkatkan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	
			Meningkatkan tata kelola administrasi untuk menunjang kualitas pelayanan bidang kesehatan	

Dapat dilihat pada tabel diatas Perumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara mengoperasionalkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang kesehatan ke dalam arah kebijakan dan strategi Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 yaitu Peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan Kesehatan, maka Operasionalisasi NSPK difokuskan pada lima program utama yang menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan yaitu:

Pertama, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diarahkan untuk mendukung peningkatan pemenuhan dan pemerataan kualitas layanan kesehatan. Fokus kebijakan meliputi peningkatan ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, penguatan sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta peningkatan layanan perizinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah.

Kedua, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan bertujuan meningkatkan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan melalui implementasi manajemen SDM kesehatan yang sesuai dengan standar nasional.

Ketiga, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman diarahkan untuk menjamin keamanan, mutu, dan ketersediaan sediaan farmasi serta alat kesehatan dan makanan minuman melalui peningkatan fungsi perizinan, pengawasan, dan pengendalian.

Keempat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan kesehatan. Program ini mendorong kemandirian masyarakat melalui upaya promotif dan preventif yang berkelanjutan.

Kelima, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mendukung peningkatan tata kelola administrasi dan manajemen pemerintahan di bidang kesehatan, guna memperkuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Dengan demikian, arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara 2025–2029 telah disusun secara konsisten berdasarkan

NSPK bidang kesehatan serta sejalan dengan arah pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan daerah, meningkatkan kualitas layanan, dan mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

3.3. Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 akan dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

Untuk mendukung strategi yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kebijakan yang akan diterapkan adalah:

1. Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
2. Meningkatkan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
4. Meningkatkan Layanan Perizinan Rumah Sakit serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
5. Meningkatkan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.
6. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan

- Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
- Meningkatkan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor.
 - Meningkatkan tata kelola administrasi untuk menunjang kualitas pelayanan bidang kesehatan.

Tabel 3.5

**Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029**

VISI (RPJMD)	KUKAR IDAMAN TERBAIK		
	Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan		
MISI (RPJMD)	Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat 2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
			Meningkatkan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
			Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
			Meningkatkan Layanan Perizinan Rumah Sakit serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan	Meningkatkan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
		Peningkatan Fungsi Tata Kelola Bidang Kesehatan	Meningkatkan tata kelola administrasi untuk menunjang kualitas pelayanan bidang kesehatan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun program-program yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Berikut program yang menjadi penjabaran dari arah kebijakan dinas Kesehatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029, yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- E. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

4.2. Uraian Kegiatan

Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, pelaksanaan pembangunan kesehatan disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Aparatur
 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 10. Peningkatan Pelayanan BLUD
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu:
1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Upaya Kesehatan Masyarakat
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
6. Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Untuk mencapai kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sub kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
- 5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah Pelaksanaan
- 6 Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 13 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- 14 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 15 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 18 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

- 19 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 20 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 21 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 22 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 23 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 25 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 26 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 27 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 28 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 30 Fasilitas Kunjungan Tamu
- 31 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 32 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 33 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 34 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 35 Pengadaan Mebel
- 36 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 37 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 39 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 40 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- 41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 42 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 43 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 44 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

10 Peningkatan Pelayanan BLUD

- 46 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- 47 Pembangunan Puskesmas
- 48 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 49 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 50 Pengembangan Puskesmas
- 51 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 52 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- 53 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 54 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 55 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 56 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
- 57 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 58 Pengembangan Rumah Sakit
- 59 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- 60 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 61 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 62 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- 63 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 64 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 65 Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar
- 66 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif
- 67 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- 68 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- 69 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 70 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 71 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
- 72 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 73 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 74 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 75 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 76 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 77 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 78 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 79 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan
- 80 Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 81 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 82 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 83 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 84 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 85 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 86 Pengambilan dan Pengiriman Sampel/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
- 87 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 88 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 89 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 90 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

- 91 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 92 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal
- 93 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 94 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- 95 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
- 96 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- 98 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
- 99 Pengelolaan Layanan Imunisasi

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- 100 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4 Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota

- 101 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
- 102 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 103 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota

- 104. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- 105 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 106 Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan

sesuai standar

107 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

108 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

109 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

110 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

111 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jas Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

112 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut

Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jas Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

113 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

6 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga

114 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

E PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

115 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

116 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

117 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel 4.1

**Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup		
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat			Jumlah Kematian Ibu		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Persentase Persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/Kota	Persentase K6		
					Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS		
					Persentase remaja puteri mendapat TTD		
						1 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</i>	
						2 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</i>	
						3 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</i>	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat			Jumlah Kematian Balita		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	1 <i>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
					Persentase K6		
					Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif		
					Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana		
						1 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</i>	
						2 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>	
						3 <i>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</i>	
						4 <i>Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			berkualitas baik, adil, dan terjangkau		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Insidensi Stunting Balita		
				Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase remaja puteri mendapat TTD	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS		
					Persentase KK Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)		
					Persentase Sarana Air Minum dilakukan pengawasan sesuai standar		
					Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)		
						1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						3 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya Akuntabilitas dan tata kelola kinerja perangkat Daerah yang efektif dan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Kinerja BLUD RSUD AM. Parikesit Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			efisien		Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1	
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersusunnya tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2	
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang	3 Administrasi Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perangkat Daerah	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	pada Perangkat Daerah	
						1 <i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
						2 <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						1 <i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
						2 <i>Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	
				Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						1 <i>Peningkatan Sarana dan</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Prasarana Disiplin Pegawai	
						2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						2 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
						3 <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
						4 <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
						5 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
						6 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	
						7 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	
						8 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
						9 <i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
						1 <i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						2 <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
						3 <i>Pengadaan Mebel</i>	
						4 <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						1 <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
						2 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
						3 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
						4 <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas lapangan, Pembayaran pajak dan	9 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perizinan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya serta Pemeliharaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya		
						1 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	
						2 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
						3 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
						4 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	
				Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas dan RSUD	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
						1 <i>Pelayanan dan Penunjang</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Pelayanan BLUD</i>	
					Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Prevalensi Obesitas > 18 tahun		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
					Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		
					Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat		
					Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		
					Persentase fasilitas		
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
					Persentase lanjut usia yang mandiri		
					Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		
					Cakupan penemuan kasus TB		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes		
					Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
					Eliminasi Kusta		
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Nasional		
					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu.		
					Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
				Tersediannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan RSUD	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan		
					Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan sesuai standar (yang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					diukur pustu atau bentuk lainnya yang sudah terakreditasi dilayanan primer)		
						1 Pembangunan Puskesmas	
						2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						4 Pengembangan Puskesmas	
						5 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
						7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
						8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
						10 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Pelayanan Kesehatan</i>	
						11 <i>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi</i>	
						12 <i>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	
						13 <i>Pengembangan Rumah Sakit</i>	
						14 <i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>	
						15 <i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	
				Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai Target	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) Angka keberhasilan pengobatan TB Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan Persentase Kualitas Udara Dalam Ruang Memenuhi syarat Jumlah Desa/Kelurahan Sehat Iklim Jumlah Kasus PD3I Jumlah Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan (DBD)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna		
					Persentase RS terakreditasi paripurna		
					Cakupan Imunisasi HPV		
						1 Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar	
						2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	
						3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
						4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	
						5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	
						6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
						7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tuberkulosis	
						8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
						9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	
						11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
						12 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
						13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						14 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
						16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
						17 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						18 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						19 Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
						20 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
						21 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	
						22 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						23 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Tuberkulosis</i>	
						24 <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</i>	
						25 <i>Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</i>	
						26 <i>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>	
						27 <i>Operasional Pelayanan Puskesmas</i>	
						28 <i>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
						1 <i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	
				Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	4 Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota			
						1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
						2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			kesehatan		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar		
				Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki Izin Praktik/Kerja	1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	
						1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun	2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						1 <i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	
						2 <i>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia kesehatan sesuai standar</i>	
						3 <i>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	
						3 <i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
						1 <i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,		Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			alat kesehatan dan makanan minuman		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar		
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		
					Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemerintah Daerah		
				Terlaksananya pengawasan dan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
						1 <i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>	
				Terlaksananya pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan	Persentase Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	2 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Terlaksananya penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	3 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
						1 <i>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air 4 Minum (DAM)	
						<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene</i> 1 <i>Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</i>	
				Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan</i> 1 <i>Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i>	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga 6	
						<i>Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman</i> 1 <i>Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</i>	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase kemitraan atau		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					kerjasama yang terlaksana		
				Terwujudnya Desa/Kelurahan GERMAS	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						<i>Peningkatan Upaya Promosi 1 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	
				Tersediannya Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						<i>Penyelenggaraan Promosi 1 Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	
				Terlaksananya Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase kader posyandu strata madya	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

Tabel 4.2

Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					Rp 1.327.442.53 8.846,99		Rp 1.209.161.99 2.555,81		Rp 1.221.957.8 83.175,72		Rp 1.236.491.7 20.677,22		Rp. 1.250.280.10 8.558,42	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas dan tata kelola kinerja perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,12	76	Rp 881.810.047. 947,99	77	Rp 936.556.732. 747,37	78	Rp 944.256.728 .199,44	79	Rp 958.110.046 .210,00	80	Rp. 966.809.829. 534,11	DINKES (Sekretariat)
	Nilai Kinerja BLUD RSUD AM. Parikesit	Nilai	82,6	82,75		83		83,25		83,5		84		RSUD AM Parikesit (Direktur)
	Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	86,6	89,66		92,72		95,78		98,84		100		RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (Direktur)
	Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	Nilai	79,4	80,5		81		81,5		82		83		RSUD RSUD Dayaku Raja (Direktur)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persen	100	100	Rp 975.000.000	100	Rp 750.000.000	100	Rp 750.000.000	100	Rp 750.000.000	100	Rp 750.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program) RSUD ABADI (Kabag USDMK) RSUD DAYAKU RAJA, RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Rp 225.000.000	6	Rp 300.000.000	6	Rp 300.000.000	6	Rp 300.000.000	6	Rp 300.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Rp 225.000.000	3	Rp 250.000.000	3	Rp 250.000.000	3	Rp 250.000.000	3	Rp 250.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	-	-	3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	3	Rp 50.000.000	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	6	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp. 150.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN			
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			PAGU	2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	Rp 100.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp.150.000.0 00	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	4	Rp 50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	3	Rp 250.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp. 160.000.000				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp. 100.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp. 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	1	Rp 100.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)			
Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp 40.000.000	1	Rp. 40.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)			
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	1	Rp 250.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)			
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp. 50.000.000	DINKES (Timker Perencanaan dan Penyusunan Program)			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat	Persen	100	100	Rp 463.974.476. 592,99	100	486.946.114. 872,37	100	488.196.617 .744,18	100	Rp 495.384.302 .958,43	100	Rp 497.390.080. 532,11	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN		
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Daerah													RSUD AM Parikesit (Wadir Umum & Keuangan) RSUD ABADI (Kabag USDMK) RSUD DAYAKU RAJA, RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	2516	3259	Rp 462.358.204. 639,99	3259	485.476.114. 872,37	3259	486.726.617 .744,18	3259	Rp 493.914.302 .958,43	3259	495.920.080. 532,11			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	N/A		Rp 252.973.404.8 02,00		265.622.075.0 42,10		265.934.700. 760,05		Rp 267.731.622. 063,62		Rp 268.233.066.4 57	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	N/A		Rp 124.436.828.0 40,35		130.658.669.4 42,37		130.971.295. 160,32		Rp 132.768.216. 463,88		Rp 133.269.660.8 57	RSUD AM. PARIKESIT (Kabag Penyusunan Program dan Keuangan)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	N/A		Rp 46.419.893.22 8,00		48.740.887.88 9,40		49.053.513.6 07,35		Rp 50.850.434.9 10,92		Rp 51.351.879.30 4	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	N/A		Rp 38.528.078.57 0,00		40.454.482.49 8,50		40.767.108.2 16,45		Rp 42.564.029.5 20,02		Rp 43.065.473.91 4	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	-	-	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp. 50.000.000,00	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset)		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	3	Rp 100.000.000	4	Rp 110.000.000	4	Rp 110.000.000	4	Rp 110.000.000	4	Rp. 110.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2	Rp 50.000.000	2	Rp 50.000.000	2	Rp 50.000.000	2	Rp 50.000.000	2	Rp.50.000.00 0	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset)		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp.10.000.00 0	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	Laporan	N/A	-	-	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp.50.000.00 0	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	N/A	20	Rp 1.491.271.95 3	16	Rp 1.300.000.00 0	16	Rp 1.300.000.0 00	16	Rp 1.300.000.0 00	16	1.300.000.00 0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	12	4	Rp 750.000.000	4	Rp 700.000.000	4	Rp 700.000.000	4	Rp 700.000.000	4	Rp.700.000.0 00	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	1	1	Rp 300.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp 200.000.000	4	Rp.200.000.0 00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabag Penyusunan Program dan Keuangan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	3	3	Rp 260.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp.300.000.0 00	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Laporan	N/A	12	Rp 181.271.953	4	100.000.000,0 0	4	100.000.000, 00	4	100.000.000, 00	4	Rp.100.000.0 00	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	N/A	1	Rp 25.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp. 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Terlaksananya	Persentase	Persen	100	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	100	Rp	DINKES

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	
				2026		2027		PAGU	2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				350.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	(Subbag. Keuangan dan Aset) RSUD ABADI (Kabag USDMK) RSUD DAYAKU RAJA, RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6	Rp 250.000.000	6	Rp 210.000.000	6	Rp 210.000.000	6	Rp 210.000.000	6	Rp 210.000.000		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	4	Rp 150.000.000	DINKES (Keuangan dan Aset)	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	RSUD DAYAKU (Timker Penyusunan Program dan Keuangan)	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	4	Rp 100.000.000	DINKES (Keuangan dan Aset)	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	100	Rp 20.000.000	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset) RSUD ABADI (Kabag USDMK)	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag Perencanaan & Keuangan)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	Rp 950.000.000	100	Rp 1.470.000.000	100	Rp 1.595.000.000	100	Rp 1.420.000.000	100	Rp 1.445.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) RSUD ABADI (Kabag USDMK) RSUD AM Dayaku Raja (Kasubag TU) RSUD AM IDRIS	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN		
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
														(Kasubag TU)		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	1	Rp -	35	Rp 150.000.000	-	-	35	Rp 150.000.000	-	-	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	1	Rp -	1	Rp 200.000.000	2	Rp 475.000.000	1	Rp 150.000.000	2	Rp 325.000.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	1	Rp 175.000.000	-	-	1	Rp 175.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	N/A	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja KPSPDM)		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2	Rp 150.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000			
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag KPSPDM)		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja KPSPDM)		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	2	Rp 150.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000	3	Rp 160.000.000			
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag KPSPDM)		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja KPSPDM)		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN			
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			PAGU	2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	49	100	Rp 250.000.000	100	Rp 250.000.000	100	Rp 250.000.000	100	Rp 250.000.000	100	Rp 250.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	N/A	50	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja KPSPDM)			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	-	-	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	25	Rp 50.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	N/A	25	Rp 50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja KPSPDM)			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	123	-	-	90	Rp 150.000.000	80	Rp 150.000.000	75	Rp 150.000.000	75	Rp 150.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)			
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	Rp 2.552.639.814	100	Rp 2.720.000.000	100	Rp 2.710.000.000	100	Rp 2.710.000.000	100	Rp 2.710.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) RSUD AM Parikesit (Wadir Umum dan Keuangan), RSUD ABADI (Kabag USDMk), RSUD Dayaku Raja (Kasubag TU), RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	N/A	11	Rp 100.000.000	11	Rp 100.000.000	11	Rp 100.000.000	11	Rp 100.000.000	11	Rp 100.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	Rp 400.000.000	2	Rp 410.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 190.000.000	1	Rp 190.000.000	1	Rp 190.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	0		1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	RSUD AM PARIKESIT (Kabag Umum)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	30	Rp 100.000.000	60	Rp 210.000.000	60	Rp 210.000.000	60	Rp 210.000.000	60	Rp 210.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	0		30	Rp 10.000.000	30	Rp 10.000.000	30	Rp 10.000.000	30	Rp 10.000.000	RSUD AM PARIKESIT (Kabag Umum)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	30	Rp 100.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	30	Rp 200.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	Rp 350.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 300.000.000	2	Rp 300.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	Rp 150.000.000	1	Rp. 100.000.000	1	Rp. 100.000.000	1	Rp. 100.000.000	1	Rp. 100.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	Rp 350.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	2	Rp 400.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	1	Rp 150.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	14	Rp 900.139.814	3	Rp 950.000.000	3	Rp 950.000.000	3	Rp 950.000.000	3	Rp 950.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	1	Rp 350.139.814	1	Rp 350.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 350.000.000	1	Rp 350.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	12	Rp 450.000.000	1	Rp 450.000.000	1	Rp 450.000.000	1	Rp 450.000.000	1	Rp 450.000.000	RSUD ABADI (Kasubag UTL)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	1	Rp 100.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	1	Rp 150.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2	Rp 152.500.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	2	Rp 150.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	1	Rp 52.500.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	Rp 500.000.000	100	Rp 4.530.000.000	100	Rp 3.530.000.000	100	Rp 2.540.000.000	100	Rp 2.540.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) RSUD AM Parikesit (Wadir Umum & keuangan), RSUD ABADI (Kabag USDMK), RSUD Dayaku Raja (Kasubag TU), RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	-	-	1	Rp 300.000.000	-	-	1	Rp 300.000.000	-	-	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Pengadaan Kendaraan	Jumlah Unit	Unit	N/A	-	-	-	-	1	Rp	-	-	-	-	DINKES

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	
				2026		2027		PAGU	2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan								100.000.000					(Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	4	Rp 500.000.000	4	Rp 3.010.000.000	4	Rp 2.410.000.000	4	Rp 1.020.000.000	4	1.520.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	4	Rp 500.000.000	-	-	4	Rp 400.000.000	-	-	4	500.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	-	-	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	10.000.000	RSUD AM PARIKESIT (Kabag Umum)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	-	-	1	Rp 2.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 10.000.000	1	10.000.000	RSUD ABADI (Kasubag UTL)	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	-	-	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000,00	1	Rp 1.000.000.000,00	1	1.000.000.000	RSUD Dayaku Raja (Kasubag TU)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	Rp -	127	Rp 1.220.000.000	101	Rp 1.020.000.000	127	Rp 1.220.000.000	101	Rp 1.020.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	-	25	Rp 200.000.000	-	-	25	Rp 200.000.000	-	-	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	-	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	Rp 1.000.000.000	100	1.000.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja URTK)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	-	-	2	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	2	Rp 20.000.000	1	20.000.000	RSUD AM PARIKESIT (Kabag Umum)	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	Rp 51.946.383.705	100	Rp 52.356.202.500	100	Rp 52.356.202.500	100	Rp 52.356.202.500	100	Rp 52.356.202.500	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) RSUD AM Parikesit (Wadir Umum & keuangan), RSUD ABADI (Kabag USDMK), RSUD Dayaku Raja (Kasubag TU), RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	13	Rp 19.750.000	13	Rp 19.000.000	13	Rp 19.000.000	13	Rp 19.000.000	13	Rp 19.000.000		
Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	DINKES	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19.429.899.949		7.522.557.000		7.522.557.000		7.522.557.000		7.522.557.000	(Kabag Umum)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp 13.449.023.520	12	Rp 10.000.000.000	12	Rp 10.000.000.000	12	Rp 10.000.000.000	12	Rp 10.000.000.000	RSUD ABADI (Kasubag UTL)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	1	Rp 6.069.044.120	1	Rp 9.000.000.000	1	Rp 9.000.000.000	1	Rp 9.000.000.000	1	Rp 9.000.000.000	RSUD Dayaku Raja (Tim Kerja URTK)
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	Rp 9.350.000.000	100	Rp 3.240.000.000	100	Rp 3.240.000.000	100	Rp 3.240.000.000	100	Rp 3.090.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian) RSUD AM Parikesit (Wadir Penunjang & pengembangan), RSUD ABADI (Kabid Penunjang), RSUD Dayaku Raja (Kasi Penunjang), RSUD AM IDRIS (Kasi Penunjang)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	7	Rp 350.000.000	7	Rp 350.000.000	7	Rp 350.000.000	7	Rp 350.000.000	7	Rp 350.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	6	Rp 250.000.000	6	Rp 250.000.000	6	Rp 250.000.000	6	Rp 250.000.000	6	Rp 250.000.000	DINKES (Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Tim Kerja URTK)

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN			
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			PAGU	2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				500.000.000									(Tim Kerja URTK)			
Peningkatan Pelayanan BLUD																	
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas dan RSUD	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	Unit Kerja	35	35	Rp 351.191.547. 836	35	Rp 384.214.415. 375	35	Rp 391.548.907 .955	35	Rp 399.379.540 .752	35	Rp 406.198.546. 502	DINKES (Subbag. Keuangan dan Aset) RS AM Parikesit (Wadir Penunjang dan Pengembangan) RSUD ABADI (Kabid Pelayanan)			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	35	35	Rp 351.191.547. 836	35	Rp 384.214.415. 375	35	Rp 391.548.907 .955	35	Rp 399.379.540 .752	35	Rp. 406.198.546. 501,72				
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	32	32	Rp 40.351.547.83 6	32	Rp 50.051.263.38 3	32	Rp 52.553.826.5 52	32	Rp 55.181.517.8 80	32	Rp. 57.940.593.7 73,75	PUSKESMAS			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	Rp 237.540.000.0 00	1	Rp 267.163.151.9 92	1	Rp 269.995.081. 403	1	Rp 273.208.022. 872	1	Rp. 276.267.952. 727,98	RSUD AM. PARIKESIT (Kabid. Pengembangan)			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	Rp 61.300.000.00 0	1	Rp 50.000.000.00 0	1	Rp 51.000.000.0 00	1	Rp 51.990.000.0 00	1	Rp. 52.990.000.0 00,00	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Non Medik)			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	Rp 12.000.000.00 0	1	Rp 17.000.000.00 0	1	Rp 18.000.000.0 00	1	Rp 19.000.000.0 00	1	Rp. 19.000.000.0 00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD AM. IDRIS			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Rp 432.027.490. 899		Rp 261.495.259. 808		Rp 266.591.154 .976,27		Rp 267.271.674 .467,22		Rp. 272.360.279. 024,31				
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Persen	1,56	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		DINKES (BIDANG P3PL)			
	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	7,2	12,2		14,7		17,2		22,2		24,70		DINKES (BIDANG P3PL)			
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen	43,42	40,11		36,79		33,48		30,16		26,85		DINKES (BIDANG P3PL)			
	Persentase fasilitas	Persen	58,83	60		65		70		75		80		DINKES			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pelayanan kesehatan sesuai standar													(BIDANG YANKES) Direktur RSUD
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	Persen	84,5	84,5		85,5		86,5		87,5		88,31		DINKES (BIDANG YANKES)
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	Persen	71	80		85		90		95		100		DINKES (BIDANG P3PL)
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	83	83		83		86		86		86		DINKES (BIDANG YANKES)
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	Persen	80	80		85		90		95		100		DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	82,78	77		79		81		83		85		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	7,7	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		DINKES (BIDANG P3PL)
	Cakupan penemuan kasus TB	Persen	70,6	80		85		90		91		91		DINKES (BIDANG P3PL)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	Persen	92	92		93		93		94		95		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	Persen	9	9		8,5		8		7,5		7		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Insidensi Stunting Balita (kasus baru)	Persen	N/A	2,30		1,7		1,30		1		1		DINKES (Timker Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat)
	Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
	Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	Persen	50	70		80		90		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	388	326		278		244		219		199		DINKES (BIDANG P3PL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Eliminasi Kusta	Persen	0.30	0.20		0.15		0.10		0.05		0.01		DINKES (BIDANG P3PL)
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp 224.305.292.749		Rp 78.602.542.208,44		Rp 72.812.037.376,28		Rp 62.806.156.867		Rp 57.008.361.424	
Tersediannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	43,24	45		50		55		60		65		DINKES (BIDANG SDK) RS AM Parikesit (Wadir Penunjang & Pengembangan), RSUD ABADI (Kabid Penunjang), RSUD Dayaku Raja (Kasi Penunjang), RSUD AM Idris (Kasi Penunjang)
	Persentase Ketersediaan Obat Essensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan RSUD	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG SDK)
	persentase puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
	Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kecamatan	20	20		20		20		20		20		DINKES (BIDANG YANKES)
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	1	Rp 11.300.000.000	1	Rp 4.500.000.000	1	Rp 4.500.000.000	1	Rp 2.000.000.000	1	Rp 2.000.000.000	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	8	11	Rp 15.075.922.000	1	Rp 1.250.000.000	1	Rp 1.250.000.000	1	Rp 1.250.000.000	1	Rp 1.250.000.000	
Pembangunan Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Unit	8	7	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	1	Rp	DINKES

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN		
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Kesehatan Lainnya	Kesehatan Lainnya yang Dibangun				9.575.922.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000		1.250.000.000	(Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	N/A	4	Rp 5.500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)		
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	6	3	Rp 4.450.000.000	9	Rp 1.500.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000			
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	3	Rp 4.450.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	1	Rp 1.000.000.000	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	N/A	0	Rp -	8	Rp 500.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)		
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	6	1	Rp 7.382.500.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	1	Rp 800.000.000	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	N/A	1		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	10	4	Rp 1.500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	8	4	Rp 1.200.000.000	2	Rp 600.000.000	2	Rp 600.000.000	2	Rp 600.000.000	2	600.000.000,00	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	3	1	Rp 300.000.000	3	Rp 620.000.000	3	Rp 620.000.000	3	Rp 620.000.000	3	Rp 620.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	N/A	1	Rp 300.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	400.000.000,00	DINKES (Timkes Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	N/A	0	Rp -	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	20.000.000,00	RSUD AM PARIKESIT (Kabid. Penunjang)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	44	640	Rp 12.285.532.000	396	Rp 7.537.732.029	408	Rp 7.537.732.029	371	Rp 7.537.732.029	371	Rp 7.537.732.029	
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	44	640	Rp 12.285.532.000	325	Rp 6.000.000.000	325	Rp 6.000.000.000	325	Rp 6.000.000.000	325	Rp 6.000.000.000	DINKES (Timker Perbekalan Alat Kesehatan)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	N/A	0	Rp -	45	Rp 200.000.000	57	Rp 200.000.000	20	Rp 200.000.000	20	200.000.000,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabid. Penunjang)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 337.732.029	1	Rp 337.732.029	1	Rp 337.732.029	1	337.732.029,00	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Medik)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	N/A	0	Rp -	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	Unit	N/A	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	RSUD AM. IDRIS

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN		
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan															
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit	N/A	6	Rp 500.000.000	6	Rp 500.000.000	6	Rp 500.000.000	6	Rp 500.000.000	6	500.000.000,00	DINKES (Timker Perbekalan Alat Kesehatan)		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	400	501	Rp 900.000.000	514	Rp 8.159.118.000	514	Rp 8.159.118.000	514	Rp 8.159.118.000	514	8.159.118.000,00			
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	N/A	500	Rp 400.000.000	500	Rp 400.000.000	500	Rp 400.000.000	500	Rp 400.000.000	500	400.000.000,00	DINKES (Timker Perbekalan Alat Kesehatan)		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 6.559.118.000	1	Rp 6.559.118.000	1	Rp 6.559.118.000	1	6.559.118.000,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabid. Penunjang)		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	N/A	1	Rp 500.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	Rp 400.000.000	1	400.000.000,00	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Non Medik)		
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	N/A	0	Rp -	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)		
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio	Unit	N/A	3	Rp 152.646.338.749	4	Rp 26.245.692.179,44	4	Rp 20.955.187.347,28	4	Rp 13.299.306.838,22	4	8.351.511.395,31			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit													
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	N/A	1	Rp 60.000.000.00 0	1	Rp 20.045.692.17 9,44	1	Rp 15.255.187.3 47,28	1	Rp 7.599.306.83 8,22	1	2.651.511.395 ,31	RSUD AM. IDRIS
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	N/A	1	Rp 92.446.338.74 9	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000,0 0	RSUD AM. PARIKESIT (Kabid. Pengembangan)
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	1	Rp 200.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	Rp 500.000.000	1	500.000.000,0 0	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Non Medik)
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana,	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 5.500.000.000	1	Rp 5.000.000.00 0	1	Rp 5.000.000.00 0	1	5.000.000.000 ,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/ atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit													
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	10	110	Rp 16.000.000.000	130	Rp 24.440.000.000	130	Rp 24.440.000.000	130	Rp 24.590.000.000	130	23.740.000.000,00	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	N/A	110	Rp 16.000.000.000	110	Rp 16.000.000.000	110	Rp 16.000.000.000	110	Rp 16.000.000.000	110	16.000.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	N/A	0	Rp -	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	12	Rp 20.000.000	12	20.000.000,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabid. Penunjang)
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	N/A	0	Rp -	1	Rp 2.920.000.000	1	Rp 2.920.000.000	1	Rp 3.070.000.000	1	2.220.000.000,00	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Medis)
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	N/A	0	Rp -	7	Rp 5.500.000.000	7	Rp 5.500.000.000	7	Rp 5.500.000.000	7	5.500.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang, Tim Kerja Penunjang Medik)
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket				0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	0,00	RSUD AM. IDRIS
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan	Keluarga	168780	174980	Rp 765.000.000	178180	Rp 450.000.000	181380	Rp 450.000.000	184580	Rp 450.000.000	184580	Rp 450.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Dasar dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas													Rujukan)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Rp 206.390.198. 150		Rp 181.527.717. 600		Rp 192.414.1 17.600		Rp 203.100.517 .600		Rp 213.986.917. 600	
Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Persen	96	96		97		98		99		100		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase K6	Persen	92	92		93		94		95		96		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase remaja puteri mendapat TTD	Persen	80	80		85		95		100		100		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS	Persen	92	92		94		98		100		100		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana	Persen	82,5	82,5		85		90		92,5		95		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	80	88		90		93		95		100		DINKES (BIDANG P3PL)
	Persentase KK Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	84,2	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG P3PL)
	Persentase Kualitas Air Minum memenuhi syarat	Persen	72,5	82,5		87,5		92,5		97,5		100		DINKES (BIDANG P3PL)
	Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas	Persen	100	100		100		100		100		100		BIDANG YANKES
	Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai Target	Persen	81	81		82		83		84		85		RSUD ABADI (Bidang Pelayanan) RSUD AM Parikesit (Wadir Pelayanan) (RSUD Dayaku Raja (Kasi. Pelayanan dan Keperawatan)
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	N/A	46		55		61		70		75		DINKES (BIDANG YANKES)
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	78,29	95		95		95		95		95		DINKES (BIDANG YANKES)
	Angka keberhasilan pengobatan TB	Persen	90,1	92		92,7		93,23		95		96,8		DINKES (BIDANG P3PL)
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	N/A	66,10%		67,90%		69,70 %		71,50 %		73,30 %		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Fasyankes	12	20		24		28		32		35		DINKES (BIDANG P3PL)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Kualitas Udara Dalam Ruang Memenuhi syarat	Persen	N/A	25		40		55		70		85		DINKES (BIDANG P3PL)
	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat Iklim	Desa/Kelurahan	N/A	2		2		2		2		2		DINKES (BIDANG P3PL)
	Jumlah Kasus PD3I	Kasus	10	6		4		2		0		0		DINKES (BIDANG P3PL)
	Jumlah Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan (DBD)	Kasus	2803	1962		1541		1401		1121		840		DINKES (BIDANG P3PL)
	Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	Persen	63,3	67		70		73		76		76		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Pesentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	13	12		11		10		10		10		DINKES (BIDANG KESMAS)
	Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	Persen	81,25	84,38		84,38		87,5		87,5		87,5		DINKES (BIDANG YANKES)
	Persentase RS terakreditasi paripurna	Persen	100	100		100		100		100		100		DINKES (BIDANG YANKES)
	Cakupan Imunisasi HPV	Persen	N/A	92		92		92		92		92		DINKES (BIDANG P3PL)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11991	13990	Rp 2.296.000.000	14264	Rp 500.000.000	14580	Rp 500.000.000	14906	Rp 500.000.000	14906	500.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11541	13354	Rp 1.038.000.000	13615	Rp 500.000.000	13917	Rp 500.000.000	14228	Rp 500.000.000	14228	500.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11169	12718	Rp 336.850.000	12967	Rp 300.000.000	13255	Rp 300.000.000	13551	Rp 300.000.000	13551	Rp 300.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53295	64561	Rp 458.319.000	65826	Rp 400.000.000	67286	Rp 400.000.000	68789	Rp 400.000.000	68789	Rp 400.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)
Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138785	147205	Rp 473.000.000	150088	Rp 400.000.000	153417	Rp 400.000.000	156844	Rp 400.000.000	156844	Rp 400.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	489728	552234	Rp 270.000.000	564482	Rp 300.000.000	577091	Rp 300.000.000	590268	Rp 300.000.000	590268	Rp 300.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN			
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			PAGU	2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	51225	56576	Rp 724.880.000	57684	Rp 500.000.000	58963	Rp 500.000.000	60280	Rp 500.000.000	60280	Rp 500.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	57987	61846	Rp 400.000.000	63217	Rp 500.000.000	64629	Rp 500.000.000	66105	Rp 500.000.000	66105	Rp 500.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16641	17748	Rp 834.040.000	18142	Rp 500.000.000	18547	Rp 500.000.000	18971	Rp 500.000.000	18971	Rp 500.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	867	925	Rp 445.000.000	945	Rp 300.000.000	966	Rp 300.000.000	988	Rp 300.000.000	988	Rp 300.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23722	18688	Rp 1.805.000.000	15723	Rp 500.000.000	12620	Rp 500.000.000	5840	Rp 500.000.000	5840	500.000.000,00	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	17465	21134	Rp 742.500.000	23247	Rp 500.000.000	25571	Rp 500.000.000	28128	Rp 500.000.000	28128	500.000.000,00	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	32	32	Rp 185.000.000	32	Rp 150.000.000	32	Rp 150.000.000	32	Rp 150.000.000	32	150.000.000,00	DINKES (Timker Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	32	32	Rp 150.000.000	32	Rp 150.000.000	32	Rp 150.000.000	32	Rp 150.000.000	32	150.000.000,00	DINKES (Timker Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	7	20	Rp 8.700.000.000	21	Rp 2.050.000.000	21	Rp 2.050.000.000	21	Rp 2.050.000.000	21	2.050.000.000,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	7	20	Rp 8.700.000.000	20	Rp 2.000.000.000	20	Rp 2.000.000.000	20	Rp 2.000.000.000	20	2.000.000.000,00	DINKES (Timker Peningkatan Gizi			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	
				2026		2027		PAGU	2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								0		0			Keluarga dan Masyarakat)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	50.000.000,00	RSUD ABADI (Kasi Penunjang Medik)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	8	Rp 200.000.000	8	Rp 200.000.000	8	Rp 200.000.000	8	Rp 200.000.000	8	200.000.000,00	DINKES (Timker Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	8	12	Rp 1.000.000.000	24	Rp 1.550.000.000	24	Rp 1.550.000.000	24	Rp 1.550.000.000	24	1.550.000.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	N/A	12	Rp 1.000.000.000	12	Rp 750.000.000	12	Rp 750.000.000	12	Rp 750.000.000	12	750.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	N/A	0	Rp -	12	Rp 800.000.000	12	Rp 800.000.000	12	Rp 800.000.000	12	800.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang, Tim Kerja Penunjang Non Medik)	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	N/A	1	Rp 200.000.000	3	Rp 470.000.000	3	Rp 470.000.000	3	Rp 420.000.000	3	420.000.000,00		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	N/A	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000,00	DINKES (Timker Promosi Kesehatan, Publikasi dan Media)	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	N/A			1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	20.000.000,00	RSUD ABADI (Kasubag UTL)	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	N/A			1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja (Kasubag TU, Tim Kerja HHKP)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	32	Rp 200.000.000	32	Rp 200.000.000	32	Rp 200.000.000	32	Rp 200.000.000	32	200.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan)	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	43	45	Rp 450.000.000	45	Rp 200.000.000	45	Rp 200.000.000	45	Rp 200.000.000	45	200.000.000,00	DINKES (Timker Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	N/A	206102	Rp 300.000.000	210139	Rp 200.000.000	214800	Rp 200.000.000	219598	Rp 200.000.000	219598	200.000.000,00	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang	Orang	0	342	Rp 50.000.000	349	Rp 50.000.000	356	Rp 50.000.000	364	Rp 50.000.000	364	50.000.000,00	DINKES (Timker Pengendalian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NAPZA	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan													dan Pemberantasan Penyakit
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	Rp 200.000.000	12	200.000.000,00	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	42	28	Rp 103.474.324.800	12	Rp 112.213.537.600	12	Rp 123.099.937.600	12	Rp 133.986.337.600	12	Rp 144.872.737.600	DINKES (Timker Kemitraan dan Kerjasama)
Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	56	64	Rp 120.000.000	64	Rp 120.000.000	64	Rp 120.000.000	64	Rp 120.000.000	64	120.000.000,00	DINKES (Timker Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	50.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	N/A	1	Rp 46.000.000.000	4	Rp 30.000.000.000	4	Rp 30.000.000.000	4	Rp 30.000.000.000	4	30.000.000.000,00	RSUD AM IDRIS (Kasubag TU)
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	N/A			1	Rp 8.574.180.000	1	Rp 8.574.180.000	1	Rp 8.574.180.000	1	8.574.180.000,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabag Umum)
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	96	32	Rp 31.944.284.350	32	Rp 16.000.000.000	32	Rp 16.000.000.000	32	Rp 16.000.000.000	32	16.000.000.000,00	UPTD PUSKESMAS
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	2	Rp 350.000.000	2	Rp 750.000.000	2	Rp 750.000.000	2	Rp 750.000.000	2	750.000.000,00	UPTD GFK dan UPTD ELEKTROMEDIK
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Unit	11	36	Rp 250.000.000	36	Rp 650.000.000	36	Rp 650.000.000	36	Rp 500.000.000	36	500.000.000,00	
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Unit	N/A	36	Rp 250.000.000	34	Rp 250.000.000	34	Rp 250.000.000	34	Rp 250.000.000	34	250.000.000,00	DINKES (Timker Regulasi,PM & Perizinan Fasyankes)
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Unit	N/A	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Pelayanan dan Keperawatan)
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten /Kota	Unit	1			1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 50.000.000	1	50.000.000,00	RSUD ABADI (Kasi Pelayanan)
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal	Laporan	10	6	Rp 30.000.000	6	Rp 50.000.000	6	Rp 50.000.000	6	Rp 50.000.000	6	50.000.000,00	DINKES (Timker Surveilans,

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN			
				2026		2027		PAGU	2028		PAGU	2029			PAGU	2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	1	1	Rp 500.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	Rp 300.000.000	1	300.000.000, 00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan)			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1214	1000	Rp 900.000.000	800	Rp 850.000.000	600	Rp 850.000.000	520	Rp 850.000.000	520	Rp 850.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	182	725	Rp 810.000.000	855	Rp 850.000.000	985	Rp 850.000.000	1001	Rp 850.000.000	1001	Rp 850.000.000	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	350	75	Rp 53.000.000	75	Rp 100.000.000	75	Rp 100.000.000	75	Rp 100.000.000	75	100.000.000, 00	DINKES (Timker Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit)			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	Rp 50.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	100.000.000, 00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)			
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	Rp 100.000.000	1	100.000.000, 00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Keluarga)			
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen	N/A	1	Rp 300.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000, 00	DINKES (Timker Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa)			
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																	
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	Persen	100	100	Rp 207.000.000	100	Rp 490.000.000	100	Rp 490.000.000	100	Rp 490.000.000	100	Rp 490.000.000	DINKES (Timker Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan)			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	32	32	Rp 207.000.000	34	Rp 490.000.000	34	Rp 490.000.000	34	Rp 490.000.000	34	490.000.000, 00				
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	32	32	Rp 207.000.000	32	Rp 250.000.000	32	Rp 250.000.000	32	Rp 250.000.000	32	250.000.000, 00	DINKES (Timker Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan)			

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN	
				2026		2027		PAGU	2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	1	Rp 200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	RSUD DAYAKU RAJA (Kasi Penunjang, Tim Kerja Penunjang Non Medik)	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 30.000.000	1	30.000.000,00	RSUD ABADI (Kasi Pelayanan)	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	N/A	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	10.000.000,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabd Pelayanan)	
Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota															
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp 1.125.000.000	100	Rp 875.000.000	100	Rp 875.000.000	100	Rp 875.000.000	100	Rp 875.000.000	DINKES (BIDANG YANKES)	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	131	157	Rp 350.000.000	125	Rp 300.000.000	125	Rp 300.000.000	125	Rp 300.000.000	125	300.000.000,00	DINKES Timker Regulasi,PM & Perizinan Fasyankes	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	4	Rp 500.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000	4	Rp 300.000.000	4	300.000.000,00	DINKES (Timker Kemitraan dan Kerjasama)	
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	21	31	Rp 275.000.000	31	Rp 275.000.000	31	Rp 275.000.000	31	Rp 275.000.000	31	275.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan)	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100	100	Rp 4.350.000.000	100	Rp 3.780.000.000	100	Rp 3.780.000.000	100	Rp 3.780.000.000	100	3.780.000.000,00	DINKES (BIDANG SDK) Direktur RSUD ABADI Wadir Umum dan Keuangan RSUD AM	

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	Persen	100	100	Rp 500.000.000	100	Rp 2.980.000.00 0	100	Rp 2.980.000.0 00	100	Rp 2.980.000.0 00	100	2.980.000.00 0,00	DINKES (Timker SDM Kesehatan)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A	150	Rp 500.000.000	450	Rp 2.980.000.00 0	450	Rp 2.980.000.0 00	450	Rp 2.980.000.0 00	450	2.980.000.00 0,00	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	Rp 500.000.000	150	500.000.000, 00	DINKES (Timker SDM Kesehatan)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A				Rp -		Rp -		Rp -		0,00	RSUD AM. PARIKESIT (Kabag Umum)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A			250	Rp 1.480.000.000	250	Rp 1.480.000.00 0	250	Rp 1.480.000.00 0	250	1.480.000.00 0,00	RSUD ABADI (Kasubag KPSPDM)
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	N/A	0	Rp -	50	Rp 1.000.000.000	50	Rp 1.000.000.00 0	50	Rp 1.000.000.00 0	50	1.000.000.00 0,00	RSUD DAYAKU RAJA (Kasubag TU, Tim Kerja KPSPDM)
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	74	100	Rp 730.000.000	100	Rp 730.000.000	100	Rp 730.000.000	100	Rp 730.000.000	100	730.000.000, 00	DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	Persen	72	72		74		76		78		80		DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	75	76		77		78		79		80		DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase sarana	Persen	70	76		77		78		79		80		DINKES

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN				
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	IRTP yang memenuhi ketentuan													(BIDANG SDK)				
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	90	91				92				93			94		95	DINKES (BIDANG SDK)
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100				100				100			100		100	DINKES (BIDANG SDK)
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
Terlaksananya pengawasan dan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	Persen	100	100	Rp 80.000.000	100	Rp 70.000.000	100	Rp 70.000.000	100	Rp 70.000.000	100	Rp 70.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	76	85	Rp 80.000.000	85	Rp 70.000.000	85	Rp 70.000.000	85	Rp 70.000.000	85	Rp 70.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)				
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
Terlaksananya pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persen	N/A	0		100	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	100	Rp 10.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)				

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	N/A			1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
Terlaksananya penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	Persen	100	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	75.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	147	170	Rp 75.000.000	170	Rp 75.000.000	170	Rp 75.000.000	170	Rp 75.000.000	170	75.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	Persentase Pangan Olahan Siap Saji memenuhi syarat (POSS)	Persen	N/A	75	Rp 250.000.000	80	Rp 250.000.000	85	Rp 250.000.000	90	Rp 250.000.000	100	250.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
Pengendalian danPengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jas Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	N/A	990	Rp 250.000.000	990	Rp 250.000.000	990	Rp 250.000.000	990	Rp 250.000.000	990	250.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	Persen	70	75	Rp 250.000.000	80	Rp 250.000.000	85	Rp 250.000.000	90	Rp 250.000.000	100	250.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	N/A	2	Rp 250.000.000	2	Rp 250.000.000	2	Rp 250.000.000	2	Rp 250.000.000	2	250.000.000,00	DINKES (Timker Penyehatan Lingkungan)
Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga														
Terlaksananya Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	Persen	100	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	Rp 75.000.000	100	75.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan	Unit	53	55	Rp 75.000.000	55	Rp 75.000.000	55	Rp 75.000.000	55	Rp 75.000.000	55	75.000.000,00	DINKES (Timker Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Medis Habis Pakai)

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persentase kader posyandu strata madya	Persen	20	20	Rp 1.325.000.000	30	Rp 250.000.000	40	Rp 250.000.000	50	Rp 250.000.000	60	250.000.000,00	DINKES (Timker ILP dan UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	4	1	Rp 1.325.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	Rp 250.000.000	1	250.000.000,00	DINKES (Timker ILP dan UKBM)

4.4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program prioritas pembangunan daerah merupakan program yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya lima tahunan) untuk menjawab isu-isu strategis dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta untuk mengembangkan potensi daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui MISI 1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, memiliki beberapa program prioritas. Program prioritas yang diampu oleh dinas Kesehatan yaitu **“Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia”** serta **“Program Etam Sejahtera”**.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Program Prioritas tersebut Adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau</i>	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1 Pembangunan Puskesmas	
			2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			3 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			4 Pengembangan Puskesmas	
			5 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
			10 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
			11 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
			12 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			13 Pengembangan Rumah Sakit	
			14 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
			8 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			9 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			10 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
			11 Operasional Pelayanan Puskesmas	
			12 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			13 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			14 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
			15 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	
			1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	
			2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			5 Pengelolaan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar	
			6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	
			7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
			10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			13 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
			15 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			16 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			17 Pengambilan dan Pengiriman Sample/Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			18 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal	
			19 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			20 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			22 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			23 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN PRIORITAS	KET.
1	2	3	4	5
			1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			2 Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	
			3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Selain Program Prioritas Pembangunan Daerah terdapat pula Program Strategis Kepala Daerah yang dirancang sebagai upaya akseleratif dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut program strategis kepala yang dikaitkan dengan program, prioritas kesehatan

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Strategis Kepala Daerah

No.	Program Strategis Kepala Daerah	Program Prioritas (Nomenklatur Dalam SIPD)	Termuat Dalam Renstra PD (✓/ X)	Kegiatan/Sub Kegiatan (Nomenklatur Dalam SIPD)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	✓	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			✓	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			✓	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
2	Program Etam Sejahtera		✓	Sub Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

Dari table 4.4 diatas dapat dilihat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sejumlah Program Strategis Kepala Daerah yang menjadi fokus utama pembangunan kesehatan daerah. Program strategis tersebut harus terintegrasi secara langsung dengan program prioritas yang telah ditetapkan serta dioperasionalkan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah. Integrasi ini menjadi penting untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan, efektivitas pelaksanaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan kesehatan.

1. Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia

Program ini merupakan salah satu Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, dimana mendukung peningkatan status gizi kelompok rentan, pencegahan stunting, serta pemeliharaan kesehatan lansia, melalui pemberian makanan pokok bergizi pada balita atau kategori PAUD serta memberikan bantuan makanan sehat bagi lansia melalui penguatan posyandu. Program ini terintegrasi dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan telah masuk dalam Renstra Dinas Kesehatan. Pelaksanaan program dioperasionalkan melalui kegiatan penyediaan layanan UKM/UKP, layanan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan lansia, serta edukasi kesehatan. Integrasi ini memastikan program tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memperkuat pemantauan kesehatan dan intervensi gizi berkelanjutan.

2. Program Etam Sejahtera

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial dan pemerataan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat Kukar, terutama kelompok rentan dan warga prasejahtera. Dimana salah satu kegiatannya berupa Jaminan Kesehatan Gratis (Cukup Pakai KTP).

Pemerintah Kutai Kartanegara bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh warga memiliki asuransi kesehatan yang aktif. Bagi warga yang belum memiliki BPJS atau menunggak iuran dapat diaktifkan kembali statusnya dan iurannya ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kukar. Selain itu kemudahan lainnya yaitu cukup membawa KTP ke fasilitas kesehatan (Puskesmas/RSUD) untuk mendapatkan layanan berobat gratis.

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung, pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,33	74,39	74,45	74,51	74,57	74,63	74,69	
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	13	13	12	13	13	12	
3	Jumlah Kematian Balita	Orang	167	167	167	166	165	160	151	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	14,2	14,1	14	13,45	12,58	11,76	10,99	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan salah satunya yaitu pada bidang Kesehatan. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	80	80	88	90	93	95	100	
2	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	0	36	46	55	61	70	75	
3	Jumlah Kematian Ibu	orang	13	13	13	13	13	13	12	
4	Jumlah Kematian Balita	orang	167	167	167	166	165	160	151	
5	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	14,2	14,1	14	13,45	12,58	11,76	10,99	
6	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	93,75	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	90,19	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	98,22	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	95,16	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	97,94	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persen	91,88	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persen	87,83	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dibidang kesehatan dan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Dimana menginstruksikan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk segera menyusun dan membahas RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Renstra tahun 2025-2029 disusun menyesuaikan perkembangan aktual isu strategis dan kebijakan bidang kesehatan baik di tingkat nasional maupun global, serta dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029. Sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan telah diselaraskan dengan pencapaian kinerja yang diharapkan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.

Renstra 2025-2029 ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik memerlukan dukungan dari seluruh komponen di PD. Oleh karena itu Sekretariat, Bidang, UPTD, UOBK dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pencapaian target-target Renstra Tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sebaik-

baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Bidang, UPTD, UOBK dan jabatan fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renstra PD ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu siklus dalam perencanaan, yang mana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renstra meliputi:

1. Pengendalian pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja, serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra
4. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:
 - a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - b. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasilkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode lima tahun ke depan, dan selanjutnya menjadi subjek perbaikan dan penyempurnaan khususnya terkait penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Ns. Kusnandar, SST., M.Adm.Kes

NIP. 19720716 199803 1 006

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.327.442.538.846,99		1.209.161.992.555,81		1.221.957.883.175,72		1.236.491.720.677,22		1.250.280.108.558,42		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				881.810.047.947,99		936.556.732.747,81		944.256.728.199,45		958.110.046.210,00		966.809.829.534,11		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	75,12	76	881.810.047.947,99	77	936.556.732.747,81	78	944.256.728.199,45	79	958.110.046.210,00	80	966.809.829.534,11	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit (Nilai)	82,6	82,75		83		83,25		83,5		84			
	Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti (Nilai)	86,6	89,66		92,72		95,78		98,84		100			
	Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja (Nilai)	79,4	80,5		81		81,5		82		83			
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				975.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	975.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				225.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	225.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1	250.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				250.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	250.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				463.974.476.592,99		486.946.114.872,81		488.196.617.744,45		495.384.302.958,00		497.390.080.532,11		
Tersusunnya tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	463.974.476.592,99	2	486.946.114.872,81	2	488.196.617.744,45	2	495.384.302.958,00	2	497.390.080.532,11		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.516	3.259		3.259		3.259		3.259		3.259			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				462.358.204.639,99		485.476.114.872,81		486.726.617.744,45		493.914.302.958,00		495.920.080.532,11		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.516	3.259	462.358.204.639,99	3.259	485.476.114.872,81	3.259	486.726.617.744,45	3.259	493.914.302.958,00	3.259	495.920.080.532,11		
1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00		
1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.491.271.953,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	4	1.491.271.953,00	4	1.300.000.000,00	4	1.300.000.000,00	4	1.300.000.000,00	4	1.300.000.000,00		
1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				25.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3	1	25.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				350.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Terlaksannnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	4	350.000.000,00	4	310.000.000,00	4	310.000.000,00	4	310.000.000,00	4	310.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6				6				6			
1.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				250.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	6	250.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00	6	210.000.000,00		
1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3	1				1				1			
1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				950.000.000,00		1.470.000.000,00		1.595.000.000,00		1.420.000.000,00		1.445.000.000,00		
Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	123	0	950.000.000,00	75	1.470.000.000,00	75	1.595.000.000,00	75	1.420.000.000,00	75	1.445.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		1		2		1		2			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	49	150		150		150		150		150			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0		35		0		35		0			
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0	0,00	35	150.000.000,00	0	0,00	35	150.000.000,00	0	0,00		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		200.000.000,00		475.000.000,00		150.000.000,00		325.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	2	475.000.000,00	1	150.000.000,00	2	325.000.000,00		
1.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2	150.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00		
1.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	2	150.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00	3	160.000.000,00		
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	49	150	500.000.000,00	150	500.000.000,00	150	500.000.000,00	150	500.000.000,00	150	500.000.000,00		
1.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	123	0	0,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00	75	150.000.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.552.639.814,00		2.720.000.000,00		2.710.000.000,00		2.710.000.000,00		2.710.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	30	2.552.639.814,00	60	2.720.000.000,00	60	2.710.000.000,00	60	2.710.000.000,00	60	2.710.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		3		3		3		3			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000.000,00		410.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	400.000.000,00	3	410.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00		
1.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	30	100.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00	60	210.000.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	350.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	350.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				900.139.814,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		950.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14	900.139.814,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00	3	950.000.000,00		
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				152.500.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	2	152.500.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				500.000.000,00		4.530.000.000,00		3.530.000.000,00		2.540.000.000,00		2.540.000.000,00		
Terlaksanannta Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	500.000.000,00	4	4.530.000.000,00	4	3.530.000.000,00	4	2.540.000.000,00	4	2.540.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0		152		101		152		101			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		300.000.000,00		0,00		300.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				500.000.000,00		3.010.000.000,00		2.410.000.000,00		1.020.000.000,00		1.520.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	4	500.000.000,00	4	3.010.000.000,00	4	2.410.000.000,00	4	1.020.000.000,00	4	1.520.000.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		1.220.000.000,00		1.020.000.000,00		1.220.000.000,00		1.020.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	0	0,00	152	1.220.000.000,00	101	1.020.000.000,00	152	1.220.000.000,00	101	1.020.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				51.946.383.705,00		52.356.202.500,00		52.356.202.500,00		52.356.202.500,00		52.356.202.500,00		
Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	15	51.946.383.705,00	15	52.356.202.500,00	15	52.356.202.500,00	15	52.356.202.500,00	15	52.356.202.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	13		13		13		13		13			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	13		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		4		4		4		4			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				19.750.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	13	19.750.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00	13	19.000.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.800.000.000,00		20.464.645.500,00		20.464.645.500,00		20.464.645.500,00		20.464.645.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	6.800.000.000,00	4	20.464.645.500,00	4	20.464.645.500,00	4	20.464.645.500,00	4	20.464.645.500,00		
1.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	13	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				44.776.633.705,00		31.522.557.000,00		31.522.557.000,00		31.522.557.000,00		31.522.557.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	15	44.776.633.705,00	15	31.522.557.000,00	15	31.522.557.000,00	15	31.522.557.000,00	15	31.522.557.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.350.000.000,00		3.240.000.000,00		3.240.000.000,00		3.240.000.000,00		3.090.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	9.350.000.000,00	7	3.240.000.000,00	7	3.240.000.000,00	7	3.240.000.000,00	7	3.090.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	38		44		44		44		44			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	12		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	6		7		7		7		7			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	27		27		27		27		27			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	27	650.000.000,00	27	700.000.000,00	27	700.000.000,00	27	700.000.000,00	27	700.000.000,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.650.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		1.470.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	38	1.650.000.000,00	44	1.470.000.000,00	44	1.470.000.000,00	44	1.470.000.000,00	44	1.470.000.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				6.200.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		570.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	6	6.200.000.000,00	7	720.000.000,00	7	720.000.000,00	7	720.000.000,00	7	570.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	12	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				351.191.547.836,00		384.214.415.375,00		391.548.907.955,00		399.379.540.752,00		406.198.546.502,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	35	35	351.191.547.836,00	35	384.214.415.375,00	35	391.548.907.955,00	35	399.379.540.752,00	35	406.198.546.502,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				351.191.547.836,00		384.214.415.375,00		391.548.907.955,00		399.379.540.752,00		406.198.546.502,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	35	35	351.191.547.836,00	35	384.214.415.375,00	35	391.548.907.955,00	35	399.379.540.752,00	35	406.198.546.502,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				432.027.490.899,00		261.495.259.808,00		266.591.154.976,27		267.271.674.467,22		272.360.279.024,31		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani (%)	92	92	122.401.033.800,00	93	122.003.537.600,00	93	132.889.937.600,00	94	143.726.337.600,00	95	154.612.737.600,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita (%)	9	9		8,5		8		7,5		7			
	Insidensi Stunting Balita (kasus baru) (%)	0	2,3		1,7		1,3		1		1			
	Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes (%)	50	70		80		90		100		100			
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Angka)	388	326		278		244		219		199			
	Eliminasi Kusta (%)	0,3	0,2		0,15		0,1		0,05		0,01			
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				206.390.198.150,00		181.527.717.600,00		192.414.117.600,00		203.100.517.600,00		213.986.917.600,00		
Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	56	64	122.401.033.800,00	64	122.003.537.600,00	64	132.889.937.600,00	64	143.726.337.600,00	64	154.612.737.600,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	8	12		24		24		24		24			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	32		32		32		32		32			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	1		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	43	45		45		45		45		45			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.541	13.354		13.615		13.917		14.228		14.228			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.991	13.990		14.264		14.580		14.906		14.906			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	10	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	182	725		855		985		1.001		1.001			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	17.465	21.134		23.247		25.571		28.128		28.128			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	350	75		75		75		75		75			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.641	17.748		18.142		18.547		18.971		18.971			
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	138.785	147.205		150.088		153.417		156.844		156.844			
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	53.295	64.561		65.826		67.286		68.789		68.789			
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.169	12.718		12.967		13.255		13.551		13.551			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	42	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	32	32		32		32		32		32			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	32	32		32		32		32		32			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	7	20		21		21		21		21			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.296.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.991	13.990	2.296.000.000,00	14.264	500.000.000,00	14.580	500.000.000,00	14.906	500.000.000,00	14.906	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				1.038.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.541	13.354	1.038.000.000,00	13.615	500.000.000,00	13.917	500.000.000,00	14.228	500.000.000,00	14.228	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				336.850.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11.169	12.718	336.850.000,00	12.967	300.000.000,00	13.255	300.000.000,00	13.551	300.000.000,00	13.551	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				458.319.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	53.295	64.561	458.319.000,00	65.826	400.000.000,00	67.286	400.000.000,00	68.789	400.000.000,00	68.789	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				473.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	138.785	147.205	473.000.000,00	150.088	400.000.000,00	153.417	400.000.000,00	156.844	400.000.000,00	156.844	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				834.040.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	16.641	17.748	834.040.000,00	18.142	500.000.000,00	18.547	500.000.000,00	18.971	500.000.000,00	18.971	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				742.500.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	17.465	21.134	742.500.000,00	23.247	500.000.000,00	25.571	500.000.000,00	28.128	500.000.000,00	28.128	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				185.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	32	32	185.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0014 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	32	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00	32	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8.700.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00		2.050.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	7	20	8.700.000.000,00	21	2.050.000.000,00	21	2.050.000.000,00	21	2.050.000.000,00	21	2.050.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	4	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1.000.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	8	12	1.000.000.000,00	24	1.550.000.000,00	24	1.550.000.000,00	24	1.550.000.000,00	24	1.550.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				200.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0	1	200.000.000,00	3	470.000.000,00	3	470.000.000,00	3	420.000.000,00	3	420.000.000,00		
1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00	32	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				450.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	43	45	450.000.000,00	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				103.474.324.800,00		112.213.537.600,00		123.099.937.600,00		133.986.337.600,00		144.872.737.600,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	42	12	103.474.324.800,00	12	112.213.537.600,00	12	123.099.937.600,00	12	133.986.337.600,00	12	144.872.737.600,00		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	56	64	120.000.000,00	64	120.000.000,00	64	120.000.000,00	64	120.000.000,00	64	120.000.000,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	10	6	30.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				810.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	182	725	810.000.000,00	855	850.000.000,00	985	850.000.000,00	1.001	850.000.000,00	1.001	850.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				53.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	350	75	53.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00	75	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 tahun (%)	1,56	1,4	309.626.457.099,00	1,4	139.491.722.208,00	1,4	133.701.217.376,27	1,4	123.545.336.867,22	1,4	117.747.541.424,31		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	7,2	12,2		14,7		17,2		22,2		24,7			
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	43,42	40,11		36,79		33,48		30,16		26,85			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	58,83	60,00		65		70		75		80			
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84,50	84,50		85,50		86,50		87,50		88,31			
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	71	80		85		90		95		100			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	83	83		83		86		86		86			
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	80	80		85		90		95		100			
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	82,78	77		79		81		83		85			
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	7,7	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4			
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	70,6	80		85		90		91		91			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				224.305.292.749,00		78.602.542.208,00		72.812.037.376,27		62.806.156.867,22		57.008.361.424,31		
Tersediannya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	10	110	224.305.292.749,00	130	78.602.542.208,00	130	72.812.037.376,27	130	62.806.156.867,22	130	57.008.361.424,31		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	400	501		514		514		514		514			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	44	640		396		408		325		325			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	8	11		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	168.780	174.980		178.180		181.380		184.580		184.580			
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	6	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	6	3		9		1		1					
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	3		4		4		4		4			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	3	1		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0		1		1		1		1			
Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	8	4	2	2	2	2								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	10	4		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				11.300.000.000,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	2	1	11.300.000.000,00	1	4.500.000.000,00	1	4.500.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				15.075.922.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		
Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	8	11	15.075.922.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00		
1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				4.450.000.000,00		1.500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	6	3	4.450.000.000,00	9	1.500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				7.382.500.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	6	1	7.382.500.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00	1	800.000.000,00		
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	0	0	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				0,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	0	0	0,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	10	4	1.500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1.200.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	8	4	1.200.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				300.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		620.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	3	1	300.000.000,00	3	620.000.000,00	3	620.000.000,00	3	620.000.000,00	3	620.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				12.285.532.000,00		7.537.732.029,00		7.537.732.029,00		7.537.732.029,00		7.537.732.029,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	44	640	12.285.532.000,00	396	7.537.732.029,00	408	7.537.732.029,00	325	7.537.732.029,00	325	7.537.732.029,00		
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	0	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00	6	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				900.000.000,00		8.159.118.000,00		8.159.118.000,00		8.159.118.000,00		8.159.118.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	400	501	900.000.000,00	514	8.159.118.000,00	514	8.159.118.000,00	514	8.159.118.000,00	514	8.159.118.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				152.646.338.749,00		26.245.692.179,00		20.955.187.347,27		13.299.306.838,22		8.351.511.395,31		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	3	152.646.338.749,00	4	26.245.692.179,00	4	20.955.187.347,27	4	13.299.306.838,22	4	8.351.511.395,31		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				16.000.000.000,00		24.440.000.000,00		24.440.000.000,00		24.590.000.000,00		23.740.000.000,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	10	110	16.000.000.000,00	130	24.440.000.000,00	130	24.440.000.000,00	130	24.590.000.000,00	130	23.740.000.000,00		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				765.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	168.780	174.980	765.000.000,00	178.180	450.000.000,00	181.380	450.000.000,00	184.580	450.000.000,00	184.580	450.000.000,00		
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				206.390.198.150,00		181.527.717.600,00		192.414.117.600,00		203.100.517.600,00		213.986.917.600,00		
Tersediannya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.214	1.000	83.989.164.350,00	800	59.524.180.000,00	600	59.524.180.000,00	520	59.374.180.000,00	520	59.374.180.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	206.102		210.139		214.800		219.598		219.598			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	36		36		36		36		36			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	96	32		32		32		32		32			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	342		349		356		364		364			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	489.728	552.234		564.482		577.091		590.268		590.268			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.225	56.576		57.684		58.963		60.280		60.280			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57.987	61.846		63.217		64.629		66.105		66.105			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	867	925		945		966		988		988			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.722	18.688		15.723		12.620		5.840		5.840			
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				270.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	489.728	552.234	270.000.000,00	564.482	300.000.000,00	577.091	300.000.000,00	590.268	300.000.000,00	590.268	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				724.880.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	51.225	56.576	724.880.000,00	57.684	500.000.000,00	58.963	500.000.000,00	60.280	500.000.000,00	60.280	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	57.987	61.846	400.000.000,00	63.217	500.000.000,00	64.629	500.000.000,00	66.105	500.000.000,00	66.105	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				445.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	867	925	445.000.000,00	945	300.000.000,00	966	300.000.000,00	988	300.000.000,00	988	300.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				1.805.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	23.722	18.688	1.805.000.000,00	15.723	500.000.000,00	12.620	500.000.000,00	5.840	500.000.000,00	5.840	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	206.102	300.000.000,00	210.139	200.000.000,00	214.800	200.000.000,00	219.598	200.000.000,00	219.598	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	342	50.000.000,00	349	50.000.000,00	356	50.000.000,00	364	50.000.000,00	364	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit				46.000.000.000,00		38.574.180.000,00		38.574.180.000,00		38.574.180.000,00		38.574.180.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0	1	46.000.000.000,00	2	38.574.180.000,00	2	38.574.180.000,00	2	38.574.180.000,00	2	38.574.180.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				31.944.284.350,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		16.000.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	96	32	31.944.284.350,00	32	16.000.000.000,00	32	16.000.000.000,00	32	16.000.000.000,00	32	16.000.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				350.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	2	350.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00	2	750.000.000,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				250.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	11	36	250.000.000,00	36	650.000.000,00	36	650.000.000,00	36	500.000.000,00	36	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				500.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	1	500.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				900.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		850.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1.214	1.000	900.000.000,00	800	850.000.000,00	600	850.000.000,00	520	850.000.000,00	520	850.000.000,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				207.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	32	32	207.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				207.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	32	32	207.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00	35	490.000.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.125.000.000,00		875.000.000,00		875.000.000,00		875.000.000,00		875.000.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	131	157	1.125.000.000,00	125	875.000.000,00	125	875.000.000,00	125	875.000.000,00	125	875.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	21	31		31		31		31					
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	4		4		4		4					
1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	131	157	350.000.000,00	125	300.000.000,00	125	300.000.000,00	125	300.000.000,00	125	300.000.000,00		
1.02.02.2.04.0002 - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	1	4	500.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00	4	300.000.000,00		
1.02.02.2.04.0004 - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		
Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	21	31	275.000.000,00	31	275.000.000,00	31	275.000.000,00	31	275.000.000,00	31	275.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				4.350.000.000,00		3.780.000.000,00		3.780.000.000,00		3.780.000.000,00		3.780.000.000,00		
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)	3,77	4,35	3.850.000.000,00	4,59	800.000.000,00	4,81	800.000.000,00	5,01	800.000.000,00	5,2	800.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)	66,67	100		100		100		100		100			
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksanannya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksanannya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1	1	350.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				3.500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	3.500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3.250.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksanannya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	3.250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	100	100	500.000.000,00	100	2.980.000.000,00	100	2.980.000.000,00	100	2.980.000.000,00	100	2.980.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		
Terlaksannanya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	150	150	500.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		2.980.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	150	150	500.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00	450	2.980.000.000,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		730.000.000,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	74	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	100	730.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)	72	72		74		76		78		80			
	Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	75	76		77		78		79		80			
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	70	76		77		78		79		80			
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	90	91		92		93		94		95			
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksannanya pengawasan dan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	76	85	80.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				80.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	76	85	80.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00	85	70.000.000,00		
1.02.04.2.02 - Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.04.2.02.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananannya penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	147	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00		
1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	147	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00	170	75.000.000,00		
1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksanannya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00		
1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00	990	250.000.000,00		
1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksanannya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	53	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	53	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00	55	75.000.000,00		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				8.525.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00		6.600.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	35	8.525.000.000,00	45	6.600.000.000,00	64	6.600.000.000,00	80	6.600.000.000,00	80	6.600.000.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Kemitraan atau kerjasama yang terlaksana (%)	100	100		100		100		100					
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.900.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		
Terwujudnya Desa/Kelurahan GERMAS	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	4	2	6.900.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6.900.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		6.100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	4	2	6.900.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00	2	6.100.000.000,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersediannya Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3	2	300.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				300.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3	2	300.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.325.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanannya Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	1	1.325.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.325.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4	1	1.325.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja adalah rangkaian dokumen terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja pemerintah (atau organisasi) yang mencakup rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), hingga laporan capaian kinerja, yang menjadi dasar alokasi anggaran, pelaksanaan program/kegiatan, serta penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, memastikan keselarasan antara target kinerja dan realisasi keuangan untuk akuntabilitas dan efisiensi.	$= \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang tersusun}}{\text{Jumlah Dokumen yang harus ada}} \right) \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) adalah dokumen pertanggungjawaban tahunan yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau satuan kerja selaku Pengguna Anggaran untuk menyajikan informasi transparan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Dalam sistem akuntansi pemerintahan, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kepala perangkat daerah atas penggunaan dana publik (APBD) yang dikelolanya.	= (Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun / Jumlah Dokumen yang harus ada) X 100%	Persen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Proporsi dari serangkaian kegiatan penatausahaan aset (Barang Milik Daerah) yang dilakukan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan regulasi (Permendagri No. 47 Tahun 2021), meliputi proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dikelola oleh	= (Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi BMD / Jumlah seluruh laporan penunjang Administrasi BMD yang ada) X 100%	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
			Perangkat Daerah.		
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pendapatan (seperti Dinas Kesehatan melalui Puskesmas/Labkes atau Dinas Perhubungan melalui retribusi parkir) untuk mengelola penerimaan daerah secara akuntabel.	$= \frac{\text{Jumlah sub kegiatan penunjang Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{Total sub kegiatan penunjang Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang ada}} \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) di instansi pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mencakup manajemen mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan, penggajian, hingga pensiun pegawai, serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian. Ini melibatkan fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian) dan operatif (teknis seperti rekrutmen, diklat, kompensasi) yang terintegrasi dalam suatu sistem (SAKD) untuk mencapai tujuan organisasi.	= (Jumlah sub kegiatan penunjang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang terlaksana / Total sub kegiatan penunjang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang ada) X 100%	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian kegiatan penunjang operasional harian kantor pemerintah daerah, mencakup manajemen surat-menyurat, kearsipan, pengadaan ATK, perlengkapan kantor, logistik, hingga dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk memastikan kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik.	$= \left(\frac{\text{Jumlah sub kegiatan penunjang Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{Total sub kegiatan penunjang Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang ada}} \times 100\%$	Persen
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan pengadaan aset atau barang yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi operasional internal perangkat daerah, seperti pengadaan mebel, peralatan kantor (printer), kendaraan dinas (perorangan, jabatan, operasional), serta rehabilitasi gedung/bangunan untuk menunjang pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan	$= \left(\frac{\text{Jumlah sub kegiatan penunjang Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana}}{\text{Total sub kegiatan penunjang Pengadaan Barang Milik Daerah yang ada}} \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
			daerah, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).		
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah penyediaan layanan administrasi dan operasional dasar untuk mendukung kelancaran tugas pokok perangkat daerah, seperti jasa surat-menyurat, komunikasi (listrik, air), pelayanan umum kantor (honorarium, ATK), hingga pemeliharaan barang dan gedung, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.	$= \frac{\text{Jumlah sub kegiatan penunjang ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana}}{\text{Total sub kegiatan penunjang ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ada}} \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
9	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksanannya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan rutin untuk merawat, memperbaiki, dan menjaga kondisi aset daerah seperti kendaraan dinas, gedung kantor, mebel, serta peralatan dan mesin lainnya, agar tetap berfungsi optimal untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional perangkat daerah dan pelayanan publik, meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya perawatan, pajak, hingga rehabilitasi ringan pada aset-aset tersebut.	= (Jumlah sub kegiatan penunjang Pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana / Total sub kegiatan penunjang Pemeliharaan barang milik daerah yang ada) X 100%	Persen
10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	Penilaian BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) adalah proses evaluasi sistematis untuk menentukan apakah suatu satuan kerja (seperti Puskesmas atau Rumah Sakit) layak menjadi BLUD, atau untuk mengukur kinerja mereka setelah berstatus BLUD.	= Jumlah BLUD Puskesmas dan RSUD dengan penilaian A	Unit

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
11	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun atau direnovasi dalam periode tertentu	Proporsi jumlah unit fasilitas pelayanan kesehatan (seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Labkesda, atau Pustu) yang telah menyelesaikan proses konstruksi fisik (baik pembangunan gedung baru maupun perbaikan gedung lama) sesuai dengan rencana anggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam satu periode tahun anggaran.	$= \left(\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang Selesai Dibangun/Direnovasi}}{\text{Jumlah Target Fasyankes yang Direncanakan Dibangun/Direnovasi}} \right) \times 100\%$	Persen
		Persentase Alat Kesehatan yg terpenuhi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan (Alkes) yang terpenuhi adalah kondisi di mana jenis dan jumlah alat kesehatan yang tersedia di suatu fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) telah sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan oleh regulasi, dalam kondisi baik, dan siap digunakan.	$= \left(\frac{\text{Jumlah Jenis Alkes yang Tersedia dan Berfungsi}}{\text{Jumlah Jenis Alkes Standar Minimal sesuai Regulasi}} \right) \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase Ketersediaan Obat Esensial pada Instalasi Farmasi Kabupaten, Puskesmas dan RSUD	Ketersediaan Obat Esensial adalah kondisi terpenuhinya stok obat-obat terpilih yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau Formularium Nasional (FORNAS) pada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), Puskesmas, dan RSUD, sehingga tidak terjadi kekosongan stok yang dapat menghambat pelayanan medis.	$= \frac{\text{Jumlah Jenis Obat Esensial yang Tersedia}}{\text{Jumlah Jenis Obat Esensial yang Dipantau (Indikator)}} \times 100\%$	Persen
		Persentase puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjutan	Puskesmas yang Melaksanakan Intervensi Lanjutan adalah Puskesmas yang telah menindaklanjuti hasil kunjungan keluarga (pendataan PIS-PK) dengan melakukan tindakan medis, edukasi, atau perubahan lingkungan pada keluarga yang memiliki indeks kesehatan rendah atau memiliki anggota keluarga yang belum memenuhi indikator kesehatan. Intervensi ini dikatakan lanjutan karena dilakukan setelah data dianalisis dan masalah diprioritaskan. Tujuannya adalah	$= \frac{\text{jumlah Puskesmas yang Melakukan Intervensi Lanjutan}}{\text{Jumlah Puskesmas di Wilayah Tersebut}} \times 100\%$	Persen

**DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026-2029**

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
			merubah status indikator dari "Tidak Sehat" atau "Pre-Sehat" menjadi "Sehat".		

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Jumlah kecamatan yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan sesuai standar (yang diukur pustu atau bentuk lainnya yang sudah terakreditasi dilayanan primer)	Jumlah wilayah kecamatan yang seluruh atau sebagian besar unit layanan primernya (seperti Puskesmas Pembantu/Pustu, Posyandu Prima, atau unit layanan mandiri lainnya) telah memenuhi standar sarana, prasarana, alat kesehatan, dan telah memiliki status Terakreditasi. Dalam konteks Transformasi Layanan Primer, standar ini kini sering dikaitkan dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP), di mana Pustu atau unit setingkatnya berfungsi sebagai koordinator layanan kesehatan di tingkat desa.	= Jumlah kecamatan yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan sesuai standar (yang diukur pustu atau bentuk lainnya yang sudah terakreditasi dilayanan primer)	Kecamatan

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persalinan di tolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat) yang memiliki kompetensi kebidanan, dan dilakukan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Polindes, Bidan Praktik Mandiri) dalam kurun waktu tertentu.	= (jumlah ibu bersalin di fasyankes oleh Nakes / Jumlah Total sasaran ibu bersalin dalam satu wilayah) X 100%	Persen
		Persentase K6	Persentase K6 adalah persentase ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal (ANC) sesuai standar minimal 6 kali selama masa kehamilan, dengan rincian distribusi waktu tertentu, oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan.	= (jumlah ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan K6 / Jumlah Total sasaran hamil dalam satu wilayah) X 100%	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase remaja putri mendapat TTD	Persentase rematri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu (total minimal 26 tablet dalam satu tahun) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	= Jumlah Remaja Putri yang Mendapat TTD / Total Sasaran Remaja Putri) X 100 %	Persen
		Persentase ibu hamil mendapat TTD/MMS	Ibu Hamil mendapat TTD/MMS adalah persentase ibu hamil yang mendapatkan dan mengonsumsi suplemen mikronutrien (TTD atau MMS) selama masa kehamilan untuk mencegah anemia defisiensi besi dan gangguan pertumbuhan janin.	= Jumlah Ibu Hamil yang mendapat minimal 90 TTD/MMS/ Jumlah Ibu Hamil yang ada di Wilayah Tersebut) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase Balita bermasalah gizi yang ditatalaksana	Persentase balita usia 0 sampai 59 bulan yang memiliki tanda klinis gizi buruk dan atau Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai z-score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas (LiLA) < kurang dari 11.5 cm pada balita usia 6 sampai 59 bulan yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat sesuai dengan tata laksana gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk usia 0 sampai 59 bulan di suatu wilayah kerja dalam kurun 1 tahun yang sama	$= \frac{(\text{Jumlah Balita Bermasalah Gizi yang Mendapat Tatalaksana} / \text{Total Balita Bermasalah Gizi yang Ditemukan}) \times 100 \%}{100 \%}$	Persen
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.	$= \frac{(\text{Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap} / \text{Total Sasaran Bayi (Surviving Infant)}) \times 100 \%}{100 \%}$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase KK Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Kondisi di mana setiap Kepala Keluarga (KK) dalam suatu wilayah (desa/kelurahan) tidak lagi buang air besar di sembarang tempat (seperti ladang, sungai, atau semak-semak) melainkan menggunakan jamban sehat, sebagai bagian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan lingkungan.	$= \left(\frac{\text{Jumlah KK yang Menggunakan Jamban Sehat}}{\text{Total Jumlah KK di Wilayah Tersebut}} \right) \times 100 \%$	Persen
		Persentase Kualitas Air Minum memenuhi syarat	kualitas air minum memenuhi syarat (E-Coli dan 4 parameter kimia tertentu) di 70% Sarana Air Minum dan 30% air minum rumah tangga	$= \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan}}{\text{Total Jumlah Sampel Air Minum yang Diperiksa}} \right) \times 100 \%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Puskesmas	Ketersediaan layanan kesehatan di Puskesmas mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) seperti promosi kesehatan, gizi, lingkungan, KIA, dan pengendalian penyakit (esensial), serta Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi rawat jalan, gawat darurat, persalinan, dan rawat inap (jika Puskesmas Perawatan), namun ketersediaannya bervariasi tergantung sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana) dan jenis Puskesmas, dengan kebutuhan penguatan SDM dan anggaran yang lebih besar untuk UKM sering menjadi tantangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024. SPM ini merupakan urusan pemerintah wajib untuk memastikan akses	= (Jumlah Capaian SPM kesehatan / Jumlah Target SPM Kesehatan) X 100 %	Persen

**DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2026-2029**

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
			kesehatan berkualitas, mencakup 12 jenis pelayanan dasar di tingkat kabupaten/kota, dengan target capaian 100%.		

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai Target	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di Rumah Sakit. SPM bertujuan untuk menjamin akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa diskriminasi, serta menjadi alat ukur akuntabilitas kinerja Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.	= (Jumlah Indikator SPM yang Memenuhi Target / Total Jumlah Indikator SPM yang Wajib Dilaporkan) X 100 %	Persen
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk.	= (Jumlah penerima pemeriksaan Kesehatan gratis pada semua kelompok usia / total penduduk) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.	= (Jumlah peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / dengan jumlah penduduk Indonesia) X 100 %	Persen
		Angka keberhasilan pengobatan TB	Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun.	= (Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap / Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan) X 100 %	Persen
		Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup adalah parameter yang digunakan untuk memantau gaya hidup sehat masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular (PTM). Penduduk dengan aktivitas fisik cukup adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan aktivitas fisik (baik saat bekerja, waktu luang, maupun transportasi)	= (Jumlah Penduduk yang Melakukan Aktivitas Fisik Cukup / Total Penduduk yang Diwawancara/Diobservasi) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
			dengan durasi dan intensitas tertentu yang setara dengan akumulasi minimal 150 menit per minggu. Aktivitas ini harus melibatkan gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan pengeluaran energi.		
		Jumlah Fasyankes (RS dan Puskesmas) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	Fasyankes yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan dinyatakan memenuhi standar baku mutu serta persyaratan kesehatan pada komponen air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, dan pengelolaan limbah sesuai regulasi.	= (Jumlah Fasyankes yang Memenuhi Syarat IKL / Total Jumlah Fasyankes yang Ada) X 100 %	Fasyankes

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase Kualitas Udara Dalam Ruang Memenuhi syarat	Kualitas Udara Dalam Ruang Memenuhi Syarat adalah kondisi udara di dalam ruangan gedung yang berdasarkan hasil pengukuran secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, berada di bawah atau sesuai dengan Nilai Ambang Batas (NAB) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Permenkes No. 2 Tahun 2023). Fokus utama indikator ini adalah memastikan ruangan memiliki ventilasi yang cukup, pencahayaan yang memadai, serta bebas dari kuman/bakteri berbahaya.	= (Jumlah Ruang/Gedung Memenuhi Standar NAB / Total Jumlah Ruang/Gedung yang Diperiksa) X 100 %	Persen
		Jumlah Desa/Kelurahan Sehat Iklim	Desa/Kelurahan Sehat Iklim adalah desa atau kelurahan yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (seperti peningkatan kasus DBD, penyakit air, atau dampak cuaca ekstrem).	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat Iklim	Desa/Kelurahan

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Jumlah Kasus PD3I	Kasus PD3I adalah penemuan kasus atau kejadian penyakit pada individu yang secara medis dapat dicegah melalui pemberian imunisasi rutin. Penyakit yang termasuk dalam kelompok ini memiliki potensi menular yang tinggi dan dapat menimbulkan kecacatan hingga kematian.	Jumlah Kasus PD3I	Kasus
		Jumlah Kasus Penyakit Berbasis Lingkungan (DBD)	Kasus DBD adalah seseorang yang menderita demam tinggi mendadak (2-7 hari) disertai dengan manifestasi perdarahan, adanya tanda-tanda kebocoran plasma (seperti peningkatan hematokrit), dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan Trombositopenia (jumlah trombosit $\leq 100.000/\text{mm}^3$). Penyakit ini dikategorikan sebagai berbasis lingkungan karena penularannya sangat bergantung pada keberadaan tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti (seperti genangan air bersih di bak mandi, barang bekas, atau vas bunga).	Jumlah Kasus DBD pada tahun tersebut	Kasus

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral	$= \frac{\text{jumlah bayi usia 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif}}{\text{jumlah bayi 6 bulan yang ada}} \times 100\%$	Persen
		Persentasi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persentase ibu hamil dengan indeks massa tubuh (IMT) prahamil atau trimester I di bawah 18,5 kg/m ² dan/atau Lingkar Lengan Atas < 23,5 cm	$= \frac{\text{jumlah ibu hamil yang teridentifikasi KEK}}{\text{jumlah ibu hamil yang diukur IMT atau LILA}} \times 100\%$	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna	Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026 Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026	= (Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 / total puskesmas yang telah teregistrasi) X 100 %	Persen
		Persentase RS terakreditasi paripurna	Persentase RS Terakreditasi Paripurna adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit yang telah menjalani survei akreditasi dan mendapatkan status kelulusan Paripurna dengan total jumlah rumah sakit yang wajib terakreditasi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.	= Jumlah RS yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total RS yang telah teregistrasi) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
		Cakupan Imunisasi HPV	Persentase anak perempuan usia kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yang sudah mendapatkan imunisasi HPV	= (Jumlah anak perempuan usia sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD)/ sederajat mendapatkan imunisasi HPV di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun / target anak perempuan usia sekolah kelas 5 SD/ sederajat) X 100 %	Persen
13	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase kepatuhan fasyankes dalam penginputan data RME	Proporsi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Laboratorium) yang telah menyelenggarakan RME secara rutin dan berhasil mengirimkan (sinkronisasi) data kunjungan pasien ke platform integrasi data kesehatan nasional (SATUSEHAT) sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepatuhan ini dinilai tidak hanya dari kepemilikan aplikasi RME, tetapi dari keaktifan pengiriman data setiap harinya.	= (Jumlah Fasyankes yang Aktif Kirim Data ke SATUSEHAT /Total Fasyankes yang Terdaftar di Wilayah Tersebut) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
14	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Persentase fasyankes yang mengajukan izin dan ditindaklanjuti	Proporsi dari seluruh permohonan izin (baru maupun perpanjangan) yang masuk melalui sistem perizinan (seperti OSS-RBA) yang telah diproses oleh tim teknis melalui verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, hingga diterbitkannya rekomendasi atau keputusan izin.	Jumlah Permohonan Izin yang Selesai Diverifikasi dibagi Total Permohonan Izin yang Masuk pada Tahun Berjalankali 100%	Persen
15	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki Izin Praktik/Kerja	Proporsi jumlah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di suatu fasilitas pelayanan kesehatan atau wilayah yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan sesuai dengan tempat penugasannya.	= (Jumlah Named/Nakes yang memiliki SIP Aktif / Total Seluruh Named/Nakes yang Bekerja di Fasyankes) X 100 %	Persen
16	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun	Dokumen resmi hasil analisis sistematis yang memuat informasi mengenai ketersediaan nakes saat ini, proyeksi kebutuhan di masa depan, serta strategi pemenuhannya (pendayagunaan) guna mencapai target pelayanan kesehatan di suatu wilayah atau fasilitas.	Jumlah Buku Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang tersusun	Buku

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
17	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang Terlatih dan Tersertifikasi Kompetensi	Proporsi jumlah tenaga medis (dokter) dan tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, dll) yang memiliki sertifikat pelatihan teknis atau sertifikat kompetensi yang masih berlaku, sesuai dengan bidang tugas dan persyaratan jabatan yang mereka emban.	= (Jumlah SDK yang Memiliki Sertifikat Pelatihan/Kompetensi Valid / Total Jumlah Seluruh SDK di Wilayah/Fasilitas Tersebut) X 100 %	Persen
18	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana distribusi yg dilakukan pengawasan	Proporsi jumlah tempat atau fasilitas yang mendistribusikan sediaan farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik) dan Alat Kesehatan yang telah diperiksa oleh petugas pengawas dalam satu periode waktu tertentu.	= (Jumlah Sarana Distribusi yang Telah Diawasi / Total Jumlah Sarana Distribusi Terdaftar di Wilayah Tersebut) X 100 %	Persen
19	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Proporsi jumlah Perusahaan Rumah Tangga (PRT) yang telah berhasil mendapatkan sertifikat izin produksi setelah melalui proses pemenuhan persyaratan teknis dan verifikasi lapangan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	= (Jumlah Sertifikat Produksi PRT yang Terbit / Jumlah Permohonan Sertifikat Produksi yang Masuk) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
20	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase izin yang telah diterbitkan yang memenuhi komitmen	Proporsi jumlah izin usaha atau sertifikat standar (seperti SPP-IRT, Izin Apotek, atau Izin Toko Obat) yang statusnya dinyatakan "Memenuhi Syarat" atau "Terverifikasi" setelah dilakukan audit/pengawasan lapangan oleh instansi teknis (Dinas Kesehatan) guna memastikan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata di lapangan.	= (Jumlah Izin yang Berhasil Diverifikasi \& Disetujui / Total Izin yang Terbit melalui OSS pada Periode Tersebut) X100 %	Persen
21	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Pangan Olahan Siap Saji memenuhi syarat (POSS)	Persentase Pangan Olahan Siap Saji (POSS) Memenuhi Syarat adalah proporsi sampel makanan siap saji yang diambil dari Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium dinyatakan memenuhi standar keamanan pangan (mikrobiologi dan kimia).	= (Jumlah Sampel POSS yang MS /Total Jumlah Sampel POSS yang Diuji) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
22	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Wajib Stiker Pembinaan yang dilakukan Pengawasan	Proporsi dari jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (seperti rumah makan, restoran, jasa boga, kantin, atau pangan siap saji) yang telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan diberikan stiker sebagai bukti status pembinaan (Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat), dibandingkan dengan total populasi TPM di wilayah tersebut. Stiker Pembinaan adalah tanda bukti bahwa petugas kesehatan telah melakukan audit lapangan dan memberikan klasifikasi keamanan pangan pada sarana tersebut.	= (Jumlah TPM yang Diinspeksi dan Ditempeli Stiker / Total Jumlah TPM yang Terdata di Wilayah Tersebut) X 100%	Persen
23	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persentase jumlah Sarana PIRT yg dilakukan pengawasan post market	industri rumah tangga pangan yang telah memiliki izin edar (nomor SPP-IRT) yang kemudian didatangi dan diperiksa kembali oleh petugas kesehatan untuk memastikan mereka benar-benar menjalankan standar keamanan pangan sesuai janji/komitmen awal.	= (Jumlah Sarana PIRT yang Telah Diawasi / Total Sarana PIRT yang Terdaftar di Wilayah Tersebut) X 100 %	Persen

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026-2029

NO	KEGIATAN RENSTRA	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR	SATUAN
24	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang menerapkan Perilaku Hidup Sehat	Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat adalah individu yang secara sadar dan mandiri mempraktikkan gaya hidup untuk menjaga, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya dari risiko penyakit.	$= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memenuhi Kriteria Sehat}}{\text{Total Populasi yang Disurvei/Dihitung}} \right) \times 100\%$	Persen
25	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Pembudayaan Germas adalah upaya untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar mempraktikkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari guna menurunkan risiko penyakit menular maupun tidak menular, menurunkan beban biaya kesehatan, dan meningkatkan produktivitas penduduk.	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan (Pembudayaan Germas)	Kegiatan
26	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kader posyandu strata madya	Kader Strata Madya adalah kader yang telah dinyatakan kompeten atau mahir dalam menguasai minimal dua klaster (kelompok) keterampilan dasar dari total 25 keterampilan dasar yang ditetapkan.	$= \left(\frac{\text{Jumlah Kader Berstatus Madya}}{\text{Total Jumlah Kader di Wilayah Tersebut}} \right) \times 100\%$	Persen